

Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum

Zulfitri, S.Ag., M.A.

M. Farid Wajdi, S.Si., S.IPL., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.

PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI

Perspektif Organisasi dan Regulasi



PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI

Perspektif Organisasi dan Regulasi

Penulis :

Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum

Zulfitri, S.Ag., M.A.

Muhammad Farid Wajdi, S.Si., S.IPI., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.



PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI

Perspektif Organisasi dan Regulasi

Penulis :

Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum
Zulfitri, S.Ag., M.A.
Muhammad Farid Wajdi, S.Si., S.IPI., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.

Desain
Arielaksita

Cetakan I Juni 2024

Diterbitkan oleh
Yayasan Laksita Indonesia
Anggota IKAPI
KSB Kelapa Gading Blok AJ 23-24 Kota Serang Banten 42122
Ph : 081292652034/081284504441
<https://laksitaindonesia.site>
Email : laksitaindonesia@gmail.com

Jamridafrizal, Zulfitri, Muhammad Farid Wajdi
Perpustakaan Sebagai Institusi :
Perspektif Organisasi Dan Regulasi
Cet. 1 – Laksita Indonesia, 2024 212 hlm, 17 x 25 cm
ISBN 978-602-5749-26-1

Dilarang keras memproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta menjualbelikannya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

@HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Sekapur Sirih

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran. Berkat rahmat Allah, Sang Pemilik Ilmu, karya sederhana ini dapat terwujud setelah melewati masa yang tak terhitung lamanya.

Perpustakaan, sebagai institusi yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa perpustakaan harus dikelola secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Namun, data menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional, jumlah kunjungan ke perpustakaan umum di Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai 10,4 juta orang, jauh di bawah potensi pengguna yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meningkatkan minat baca dan kunjungan ke perpustakaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dan manfaat perpustakaan. Banyak masyarakat yang masih memandang perpustakaan sebagai tempat penyimpanan buku yang membosankan dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengubah citra perpustakaan menjadi tempat yang menarik, menyenangkan, dan bermanfaat bagi semua kalangan.

Selain itu, perpustakaan juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Perpustakaan harus menyediakan koleksi yang beragam dan relevan, serta layanan yang inovatif dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan perpustakaan.

Peningkatan pemanfaatan perpustakaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pengelola perpustakaan semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu menyadari bahwa perpustakaan adalah milik mereka dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, diharapkan perpustakaan dapat menjadi pusat belajar dan pengembangan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, buku ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang perpustakaan sebagai institusi yang dinamis dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi

strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh perpustakaan untuk tetap relevan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, sebagaimana pepatah Melayu mengatakan, 'Tak ada gading yang tak retak. ' Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca, baik secara tertulis maupun lisan, demi perbaikan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pencinta ilmu perpustakaan dan informasi, serta semua pihak yang senantiasa mencari ilmu pengetahuan.

Serang, Juli 2024

Penulis



5

Isu Dan Tantangan Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum, sebagai institusi yang berakar dalam sejarah dan terus berkembang seiring zaman, kini menghadapi lanskap isu dan tantangan yang semakin kompleks. Dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan ekspektasi masyarakat telah mendorong perpustakaan umum untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, perpustakaan umum telah mengalami pergeseran paradigma dari sekadar tempat penyimpanan buku menjadi pusat pembelajaran dan ruang komunitas yang dinamis. Perpustakaan umum tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan akses informasi, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan literasi, dan promosi inklusi sosial. Namun, transformasi ini juga disertai dengan munculnya berbagai tantangan baru yang perlu diatasi.

5.1 Tantangan Masa Kini Perpustakaan Umum

Tantangan-tantangan yang dihadapi perpustakaan umum di era modern ini beragam dan kompleks, mulai dari isu-isu mendasar seperti pendanaan dan kesenjangan digital, hingga pergeseran paradigma tentang peran perpustakaan dalam masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan hak asasi manusia, perpustakaan umum dituntut untuk tidak hanya menjadi penyedia informasi, tetapi juga agen perubahan yang aktif memperjuangkan kesetaraan dan inklusi.

Sejumlah tantangan utama yang dihadapi perpustakaan umum adalah meningkatnya penekanan pada isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kepastakawanan kritis. Perpustakaan umum tidak lagi dipandang sebagai institusi netral yang hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang memiliki tanggung jawab sosial untuk memberdayakan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai peran perpustakaan dalam masyarakat, serta bagaimana perpustakaan dapat berkontribusi secara efektif dalam mewujudkan keadilan sosial.

5.1.1 Peningkatan isu Keadilan Sosial, Hak Asasi Manusia, dan Kepustakawanan Kritis

. Peningkatan penekanan pada isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kepastakawanan kritis telah mendorong perpustakaan umum untuk merefleksikan peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Perpustakaan tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi juga sebagai ruang publik yang memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan sosial positif.

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, serta peraturan dan standar perpustakaan lainnya, semuanya menegaskan pentingnya peran perpustakaan umum dalam mewujudkan keadilan sosial dan memenuhi hak asasi manusia. Perpustakaan umum diharapkan dapat menyediakan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, memberdayakan individu dan komunitas, serta melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dalam konteks ini, konsep kepastakawanan kritis (CritLib) muncul sebagai pendekatan yang mendorong perpustakaan untuk secara aktif terlibat dalam mengatasi ketidakadilan sosial. CritLib menantang asumsi netralitas dalam praktik kepastakawanan dan mendorong pustakawan untuk secara kritis mengevaluasi peran perpustakaan dalam sistem kekuasaan yang lebih luas.

Salah satu aspek penting dari keadilan sosial yang menjadi perhatian perpustakaan umum adalah keadilan informasi. Konsep ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi dan sumber daya perpustakaan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau kemampuan fisik. Perpustakaan umum diharapkan dapat menjadi ruang inklusif yang merangkul keberagaman dan memberikan layanan yang relevan dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat.

Namun, penerapan keadilan sosial dalam praktik perpustakaan tidak selalu mudah. Terdapat berbagai tantangan dan dilema yang perlu dihadapi, mulai dari isu pendanaan, kesenjangan digital, hingga perdebatan mengenai netralitas dan aktivisme dalam kepastakawanan. Oleh karena itu, penting bagi perpustakaan umum untuk terus mengembangkan strategi dan inovasi yang dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan mewujudkan keadilan sosial dalam layanan perpustakaan.

5. 1. 1. 1 Perpustakaan Umum Dan Keadilan Sosial

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Amanat ini menjadi landasan bagi perpustakaan umum untuk berperan dalam mewujudkan keadilan sosial.

UU No. 43 Tahun 2007 . Pasal 5 ayat (1) juga menegaskan hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh layanan dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, SNP Umum No. 2. Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, selanjutnya disebut UU NO. 8 Tahun 2016, semuanya memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui layanan yang inklusif dan aksesibel.

Pandangan Jaeger dan Taylor (2019) turut mendukung peran perpustakaan umum dalam mewujudkan keadilan sosial. Mereka menyatakan bahwa institusi informasi berperan dalam mempromosikan hak-hak individu dan menciptakan komunitas yang lebih adil¹²⁶. Mathiesen (2012) bahkan menegaskan bahwa akses ke perpustakaan umum merupakan hak asasi manusia itu sendiri.¹²⁷

Perpustakaan umum hanya menyediakan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memberdayakan individu dan komunitas. Melalui penyediaan koleksi yang beragam dan inklusif, perpustakaan umum menjadi ruang inklusif yang merayakan keberagaman dan mencerminkan kekayaan budaya masyarakat. Program-program yang diselenggarakan, seperti pelatihan literasi, keterampilan, dan diskusi publik, tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberdayakan dan mendorong partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.

Komitmen perpustakaan umum terhadap keadilan sosial juga tercermin dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas informasi dan pendidikan. Perpustakaan umum menyediakan akses terhadap berbagai sumber informasi, baik cetak maupun digital, untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Perpustakaan umum juga berperan dalam melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang dijamin oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Dalam konteks Indonesia, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) menjamin hak ini, sementara UU NO. 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dan berhak mendapatkan layanan publik tanpa diskriminasi.

Perpustakaan umum, sebagai penyelenggara pelayanan publik, memiliki kewajiban untuk berperilaku adil dan tidak diskriminatif. PP. No. 24 Tahun 2014 dan Standar Nasional Perpustakaan mewajibkan perpustakaan memperhatikan kebutuhan pemustaka dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia dari sekitar 16,5 juta orang pada tahun 2021

¹²⁶ Bertot, J. C., Gorham, U., Jaeger, P. T., & Sarin, L. C. (2014). Big data, libraries, and the information policies of the Obama administration. *The Bowker Annual*.

¹²⁷ Mathiesen, K. (2012). The human right to a public library. *Journal of Information Ethics, Forthcoming*.

menjadi sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sekitar 7,6 juta orang penyandang disabilitas usia produktif terlibat dalam dunia kerja, yang mencakup sekitar 45% dari total jumlah orang penyandang disabilitas usia produktif. (<https://www.kominfo.go.id>)¹²⁸

Jaeger, Taylor, dan Gorham (2015) menekankan peran perpustakaan modern dalam menjembatani kesenjangan dan memajukan inklusi digital, memastikan akses terhadap pengetahuan bagi semua¹²⁹. Brimhall-Vargas (2015) menyoroti peran positif perpustakaan dalam keadilan sosial dengan menyediakan layanan pendidikan dan informasi bagi populasi yang terpinggirkan. Cooke dan Sweeney (2017) menambahkan bahwa komitmen perpustakaan terhadap keadilan sosial harus melampaui sekadar mengakomodasi keberagaman; tindakan mereka harus menantang status quo¹³⁰

Namun, McCook and Phenix (2006) mengingatkan bahwa perpustakaan juga dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial jika akses ditolak, layanan berbeda, kurangnya bahan pustaka yang sesuai, dan peraturan yang diskriminatif diterapkan¹³¹

2.3.2.2 Perpustakaan Umum Dan Hak Asasi Manusia

. Pembukaan UUD 1945(UUD 1945) mengamanatkan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Perpustakaan umum, sebagai salah satu pilar penting dalam masyarakat demokratis, memiliki peran krusial dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial tersebut.

Perpustakaan umum tidak hanya menyediakan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kemampuan fisik, tetapi juga berperan aktif dalam memberdayakan individu dan komunitas. Melalui penyediaan koleksi yang beragam, perpustakaan umum menjadi ruang inklusif yang merayakan keberagaman dan mencerminkan kekayaan budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 43 Tahun

¹²⁸[https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-](https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran_pers,diakses%2019-5-2s023)

[kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran_pers,diakses 19-5-2s023](https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran_pers,diakses%2019-5-2s023)

¹²⁹ Jaeger, P. T., Taylor, N. G., & Gorham, U. (2015). *Libraries, Human Rights, and Social Justice: Enabling Access and Promoting Inclusion*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

¹³⁰ Brimhall-Vargas, M. (2015). Where the rubber meets the road: the role of libraries and librarians in bringing equitable access to marginalized communities. *The Library Quarterly*, 85(2), 193-199.

¹³¹ McCook, K. D. L. P., & Phenix, K. J. (2007). Public libraries and human rights. *Public Library Quarterly*, 25(1-2), 57-73.

2007 . Pasal 5 ayat (1), yang menegaskan hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh layanan dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Lebih dari sekadar tempat penyimpanan buku, perpustakaan umum juga menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan diri bagi masyarakat. Program-program yang diselenggarakan, seperti pelatihan literasi, keterampilan, dan diskusi publik, tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberdayakan dan mendorong partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang mendorong perpustakaan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang inklusif.

Komitmen perpustakaan umum terhadap keadilan sosial juga tercermin dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas informasi dan pendidikan. Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri dan memperoleh informasi. Perpustakaan umum, dengan menyediakan akses terhadap berbagai sumber informasi, baik cetak maupun digital, menjadi sarana penting dalam mewujudkan hak-hak tersebut. Mathiesen (2012) bahkan menegaskan bahwa akses ke perpustakaan umum merupakan hak asasi manusia itu sendiri¹³².

Perpustakaan umum juga berperan dalam melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang dijamin oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan menyediakan koleksi yang beragam dan inklusif, perpustakaan umum memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai perspektif dan gagasan, sehingga mendorong dialog yang sehat dan memperkuat demokrasi.

Komitmen terhadap inklusi juga tercermin dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 dan SNP Umum No. 2. Tahun 2024 mengamanatkan penyediaan fasilitas dan layanan yang mengakomodasi kebutuhan khusus, seperti koleksi buku braille, buku audio, teknologi bantu, dan staf terlatih.

Dengan demikian, perpustakaan umum bukan hanya sekadar gudang pengetahuan, melainkan agen perubahan sosial yang aktif berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis. Melalui layanan dan sumber daya yang merata, perpustakaan umum memberdayakan individu, memperkaya kehidupan masyarakat, dan mendorong transformasi sosial yang positif, sejalan dengan cita-cita keadilan sosial yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945

2.3.2.3 Kepustakawanan Kritis (Critlib)

Konsep "Critical Librarianship" secara formal diperkenalkan oleh Sanford Berman pada tahun 1993 dalam proposalnya ke Library of Congress (LOC) untuk memasukkan istilah ini sebagai judul subjek. Berman (1993) menyarankan agar

¹³² Mathiesen, K. (2012). The human right to a public library. *Journal of Information Ethics, Forthcoming*.

istilah ini diterapkan pada karya-karya literatur perpustakaan yang mengedepankan "pertimbangan kondisi manusia dan hak asasi manusia daripada masalah profesional lainnya."¹³³

Meskipun istilah ini relatif baru, praktik perpustakaan kritis sudah mengakar dalam sejarah perpustakaan. Contohnya, perpustakaan umum di Amerika Serikat telah berupaya menyediakan sumber daya informasi yang gratis dan setara bagi semua warga negara sejak pertengahan abad kesembilan belas (Brady & Abbot, 2015)¹³⁴.

Sanford Berman adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan Critical Librarianship. Ia dikenal sebagai aktivis yang gencar menyuarakan praktik perpustakaan alternatif, terutama melalui kritiknya terhadap bias dalam tajuk subjek Library of Congress (LOC). Berman berpendapat bahwa perpustakaan harus mempertimbangkan kondisi manusia dan hak asasi manusia dalam setiap aspek layanannya.

E. Drabinski, seorang pakar lain dalam bidang ini, menyoroti bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyedia informasi, namun juga merupakan produk dari sistem kekuasaan yang lebih luas. Drabinski (2019) mengungkapkan bagaimana perpustakaan dipengaruhi oleh isu-isu seperti rasisme, patriarki, dan kapitalisme, yang pada gilirannya dapat membentuk layanan dan koleksi perpustakaan.¹³⁵

M. Farkas, dalam pandangannya, menekankan bahwa Critical Librarianship telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam profesi perpustakaan. Ia menyatakan bahwa Critical Librarianship telah merambah berbagai aspek pekerjaan pustakawan, mulai dari pengarsipan hingga layanan publik, sehingga mendorong perubahan positif dalam praktik perpustakaan (Farkas, 2017).¹³⁶

Sementara itu, K. Garcia menegaskan bahwa prinsip-prinsip Critical Librarianship, seperti keadilan sosial dan inklusivitas, sebenarnya telah ada sejak awal perkembangan profesi perpustakaan, meskipun istilah ini baru muncul belakangan (Garcia, 2015)¹³⁷. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap isu-isu sosial dan hak asasi manusia telah menjadi bagian dari nilai-nilai inti perpustakaan sejak lama.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah Critical Librarianship adalah penerbitan *Library Bill of Rights* oleh American Library Association (ALA) pada tahun 1939. Dokumen ini menggarisbawahi hak pengguna perpustakaan atas

¹³³ Berman, S. (1993). Prejudices and antipathies: A tract on the LC subject heads concerning people. (*No Title*).

¹³⁴ Brady, H., & Abbott, F. (2015). A history of US public libraries. *Digital Public Library of America*.

¹³⁵ Drabinski, E. (2019). What is critical about critical librarianship?. *Art libraries journal*, 44(2), 49-57.

¹³⁶ Farkas, M. (2017). Never neutral: Critical librarianship and technology. *American Libraries*, 48(1-2), 70.

¹³⁷ Garcia, K. (2015). Keeping up with... critical librarianship. *Coll Res Libr News*.

kebebasan intelektual dan peran pustakawan dalam mendukung hak-hak tersebut (ALA, 1939)¹³⁸. *Library Bill of Rights* mencerminkan penerapan nilai-nilai teori kritis dalam praktik perpustakaan, bahkan sebelum istilah "Critical Librarianship" secara resmi digunakan.

Kepustakawanan Kritis (CritLib) adalah gerakan yang muncul sebagai respons terhadap tantangan keadilan sosial dan hak asasi manusia (HAM) dalam perpustakaan. CritLib mempertanyakan asumsi netralitas dalam praktik kepustakawanan dan mendorong pustakawan untuk secara aktif terlibat dalam mengatasi ketidakadilan sosial.

CritLib, yang berakar pada "Teori Ras Kritis" (CRT), mendorong pustakawan untuk tidak hanya memahami budaya yang berbeda, tetapi juga kritis terhadap diri sendiri dan institusi mereka (Winkelstein, 2017)¹³⁹. Perpustakaan dapat menerapkan prinsip-prinsip CritLib dengan mengembangkan koleksi yang mewakili suara dan pengalaman kelompok yang terpinggirkan, menyelenggarakan program yang membahas isu-isu keadilan sosial, dan menggunakan platform mereka untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan kompetensi inti pustakawan dalam hal keadilan sosial yang tercantum dalam American Library Association's (ALA) Core Competences of Librarianship (2023).

Penerapan CritLib juga dapat dikaitkan dengan beberapa kompetensi inti pustakawan menurut IFLA Guidelines for Professional LIS Education Programmes (2022), seperti "Informasi dalam Masyarakat" dan "Literasi dan Pembelajaran." Dalam konteks ini, pustakawan kritis tidak hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga secara aktif terlibat dalam memberdayakan masyarakat dan mempromosikan literasi informasi yang kritis.

2.3.2.4 Netralitas Vs. Aktivisme: Kontroversi Dalam Kepustakawanan

Penerapan Kepustakawanan Kritis (CritLib) dalam perpustakaan umum memicu perdebatan sengit mengenai konsep netralitas dan aktivisme. Sebagian pustakawan, mengacu pada Kode Etik Pustakawan Indonesia yang menekankan pentingnya sikap tidak memihak dan profesionalisme, berpegang teguh pada prinsip netralitas. Mereka berpendapat bahwa perpustakaan harus tetap objektif dan tidak memihak dalam menyediakan informasi, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 43 Tahun 2007. Netralitas dipandang penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari bias yang dapat merusak reputasi perpustakaan sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan.

Namun, pendukung CritLib berpendapat bahwa netralitas dalam praktik perpustakaan dapat menjadi bumerang. Mereka berargumen bahwa netralitas yang

¹³⁸ Plan, S. (1939). *Library Bill of Rights*.

¹³⁹ Winkelstein, J. A. (2017). *Social Justice in Action: Cultural Humility, Scripts, and the LIS Classroom*. In N. A. Cooke & M. E. Sweeney (Eds.), *Teaching for Justice: Implementing Social Justice in the LIS Classroom* (hlm.139-168). Sacramento, CA: Library Juice

dipahami secara tradisional dapat melanggengkan ketidakadilan sosial dengan mengabaikan atau meremehkan isu-isu struktural seperti rasisme, diskriminasi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Dengan tidak mengambil sikap terhadap masalah-masalah ini, perpustakaan secara tidak langsung mendukung status quo yang tidak adil.

Mathiesen (2015) menawarkan perspektif yang lebih bernuansa dalam perdebatan ini. Ia berpendapat bahwa netralitas dapat menjadi efektif jika disertai dengan nilai-nilai profesional yang kritis, seperti komitmen terhadap kesetaraan, keadilan, dan inklusi (204)¹⁴⁰. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia, **Deklarasi IFLA tentang Perpustakaan dan Kebebasan Intelektual**,¹⁴¹ serta tujuan perpustakaan dalam memberikan layanan kepada semua masyarakat tanpa diskriminasi yang tercantum dalam Standar Nasional Perpustakaan Umum. Dengan kata lain, pustakawan dapat tetap netral dalam arti tidak memihak pada kelompok atau ideologi tertentu, namun tetap aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial melalui pemilihan koleksi, pengembangan program, dan advokasi kebijakan yang inklusif.

Namun, Mathiesen juga memperingatkan bahwa tanpa prinsip-prinsip kritis ini, netralitas dapat mengarah pada ketidaksetaraan layanan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan. Perpustakaan yang hanya berfokus pada netralitas tanpa memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan komunitas yang beragam dapat secara tidak sengaja mengabaikan atau bahkan memperburuk ketidakadilan yang ada.

Oleh karena itu, perdebatan antara netralitas dan aktivisme dalam kepustakawanan bukanlah sekadar pilihan antara dua kutub yang berlawanan. Ini adalah tantangan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara objektivitas dan advokasi, antara netralitas dan keterlibatan sosial. Pustakawan perlu mengembangkan kesadaran kritis terhadap isu-isu keadilan sosial dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik sehari-hari mereka, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan prinsip-prinsip internasional yang relevan. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi agen perubahan sosial yang aktif berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

2.3.2.5 Keadilan Informasi: Kerangka Kerja Untuk Layanan Perpustakaan Yang Adil

Mathieson (2015) mengusulkan konsep "keadilan informasi" sebagai kerangka kerja untuk mewujudkan keadilan sosial dalam layanan perpustakaan (204)¹⁴². Keadilan informasi tidak hanya mengharuskan perpustakaan untuk mengakui, memahami, dan melayani komunitas yang kurang

¹⁴⁰ Mathiesen, K. (2015). Informational Justice: A Conceptual Framework for Social Justice in Library and Information Services. *Library Trends*, 64, 198-225.

¹⁴¹ FAIFE, I. (1999). IFLA Statement on Libraries and Intellectual Freedom.

¹⁴² Mathiesen, K. (2015). Informational Justice: A Conceptual Framework for Social Justice in Library and Information Services. *Library Trends*, 64, 198-225.

terlayani, tetapi juga memastikan bahwa komunitas tersebut juga berperan sebagai sumber daya dan suara dalam membentuk layanan perpustakaan. Ini berarti perpustakaan harus secara aktif melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan, mendengarkan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memastikan bahwa layanan dan program perpustakaan relevan dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat.

Di Indonesia, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3), berlaku untuk semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 menegaskan hal ini, menjamin kelangsungan hidup dan hak asasi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dan berhak mendapatkan layanan publik tanpa diskriminasi.

Dalam konteks ini, perpustakaan sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk berperilaku adil dan tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam PP. No. 24 Tahun 2014 dan Standar Nasional Perpustakaan yang mewajibkan perpustakaan memperhatikan kebutuhan pemustaka dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. [2]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia dari sekitar 16,5 juta orang pada tahun 2021 menjadi sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sekitar 7,6 juta orang penyandang disabilitas usia produktif terlibat dalam dunia kerja, yang mencakup sekitar 45% dari total jumlah orang penyandang disabilitas usia produktif. (<https://www.kominfo.go.id>)¹⁴³

Perpustakaan memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia, dan akses ke perpustakaan umum dianggap sebagai hak asasi manusia itu sendiri (Mathiesen, 2013). Keterlibatan pustakawan publik dalam keadilan sosial telah berlangsung lebih dari seabad, dimulai dengan penyediaan layanan sosial bagi imigran dan warga kelas pekerja. Perpustakaan berperan sebagai "universitas rakyat" selama Depresi Hebat, serta membantu anggota militer dalam Perang Dunia II dan populasi pedesaan yang kurang terlayani (Rioux, 2017)¹⁴⁴

Jaeger, Taylor, dan Gorham (2015) menekankan peran perpustakaan modern dalam menjembatani kesenjangan dan memajukan inklusi digital, memastikan akses terhadap pengetahuan bagi semua. Perpustakaan menjadi pondasi hak asasi

¹⁴³[https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran_pers.diakses 19-5-2s023](https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran_pers.diakses%2019-5-2s023)

¹⁴⁴Rioux, K. (2017). Toward a Unified Social Justice Stance for Library and Information Science Curricula. In T. S. Acord & E. G. Hawkes (Eds.), *Teaching for Justice: Implementing Social Justice in the LIS Classroom* (hlm.xx-xx). Sacramento, CA: Library Juice

manusia dan konstruksi keadilan sosial, memelihara kerangka hak asasi manusia demi keadilan sosial yang berkelanjutan. . (122)¹⁴⁵

Perpustakaan umum, seperti yang disoroti Brimhall-Vargas (2015), memainkan peran positif dalam keadilan sosial dengan menyediakan layanan pendidikan dan informasi bagi populasi yang terpinggirkan¹⁴⁶. Cooke dan Sweeney (2017) menambahkan bahwa komitmen perpustakaan terhadap keadilan sosial harus melampaui sekadar mengakomodasi keberagaman; tindakan mereka harus menantang status quo. (6)¹⁴⁷.

Namun, McCook and Phenix (2006) mengingatkan bahwa perpustakaan juga dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. [8] Akses yang ditolak, layanan yang berbeda, kurangnya bahan pustaka yang sesuai, dan peraturan yang diskriminatif dapat menghalangi keadilan sosial. Perhatian juga meningkat terhadap dampak denda perpustakaan terhadap masyarakat miskin, mendorong Resolusi ALA pada tahun 2019 yang mendesak penghapusan denda (ALA 2019d)¹⁴⁸

5. 1. 2 Isu Keuangan Perpustakaan Umum Di Indonesia: Tantangan, Studi Komparatif, Dan Strategi Inovatif

Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2023 menyebutkan bahwa perpustakaan umum dapat menggali dana dari masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti hibah, sumbangan sukarela, atau kerjasama dengan pihak swasta (Pasal 47 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2007), sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut beberapa strategi inovatif yang dapat dipertimbangkan:

1. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Perpustakaan dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendapatkan dukungan finansial, pelatihan staf, atau sumber daya lainnya. Contohnya, perpustakaan dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan akses internet gratis atau pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat.
2. Pengembangan Layanan Berbayar: Perpustakaan dapat menawarkan layanan berbayar tertentu, seperti akses ke koleksi khusus, ruang belajar privat, atau

¹⁴⁵Jaeger, P. T., Taylor, N. G., & Gorham, U. (2015). *Libraries, Human Rights, and Social Justice: Enabling Access and Promoting Inclusion*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

¹⁴⁶Brimhall-Vargas, M. (2015). Where the rubber meets the road: the role of libraries and librarians in bringing equitable access to marginalized communities. *The Library Quarterly*, 85(2), 193-199.

¹⁴⁷Cooke, N. A., & Sweeney, M. E. (2017). *Teaching for Justice: Implementing Social Justice in the LIS Classroom*. Sacramento, CA: Library Juice.

¹⁴⁸American Library Association. (2019). *Resolution on Monetary Library Fines as a Form of Social Inequity*. CD# 38. Chicago: American Library Association.

pelatihan keterampilan, untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Layanan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masyarakat setempat, seperti kursus bahasa asing, pelatihan komputer, atau kelas pengembangan diri.

3. Penggalangan Dana: Perpustakaan dapat mengadakan kegiatan penggalangan dana, seperti konser amal, lelang buku, atau kampanye donasi online. Selain itu, perpustakaan dapat memanfaatkan platform crowdfunding untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mendukung proyek-proyek perpustakaan.
4. Pemanfaatan Teknologi: Perpustakaan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Misalnya, penggunaan sistem otomasi perpustakaan dapat membantu mengelola koleksi, sirkulasi, dan layanan pengguna dengan lebih efisien. Selain itu, perpustakaan dapat mengembangkan aplikasi mobile atau platform online untuk menyediakan layanan digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Selain mencari sumber pendanaan alternatif, perpustakaan umum juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2014 Pasal 43 ayat (2) yang mengatur tentang standar pengelolaan perpustakaan, termasuk pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

Studi kasus perpustakaan umum di Indonesia yang telah berhasil mengatasi tantangan keuangan dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi perpustakaan lain.

Untuk lebih memahami tantangan ini, studi komparatif dengan negara maju seperti Amerika Serikat dapat memberikan perspektif yang berguna. Di Amerika Serikat, meskipun banyak orang memiliki pandangan positif terhadap perpustakaan dan sering menggunakannya, sebuah studi pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa hanya 27% responden menyatakan akan memilih retribusi perpustakaan. Lebih lanjut, hanya 35% responden yang bersedia membayar pajak daerah yang lebih tinggi, dan 19% secara tegas menolak membayar pajak lebih untuk mendukung perpustakaan umum setempat (OCLC/ALA 2018)¹⁴⁹. Data ini menunjukkan bahwa bahkan di negara maju, dukungan finansial masyarakat terhadap perpustakaan umum belum sepenuhnya optimal.

Dengan menerapkan strategi-strategi inovatif dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, perpustakaan umum di Indonesia dapat mengatasi tantangan keuangan, meningkatkan kualitas layanan

5. 1. 3 Menilai Nilai Perpustakaan Umum: Sebuah Kebutuhan Mendesak

¹⁴⁹ OCLC/ALA. (2018). *From Awareness to Funding: Voter Perceptions and Support of Public Libraries in 2018*. Dublin, OH: OCLC. <https://doi.org/1025333/C3M92S>

Peningkatan penekanan pada isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kepastakawanan kritis telah mendorong perpustakaan umum untuk merefleksikan peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Perpustakaan tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi juga sebagai ruang publik yang memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan sosial positif.

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, serta peraturan dan standar perpustakaan lainnya, semuanya menegaskan pentingnya peran perpustakaan umum dalam mewujudkan keadilan sosial dan memenuhi hak asasi manusia. Perpustakaan umum diharapkan dapat menyediakan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, memberdayakan individu dan komunitas, serta melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dalam konteks ini, konsep kepastakawanan kritis (CritLib) muncul sebagai pendekatan yang mendorong perpustakaan untuk secara aktif terlibat dalam mengatasi ketidakadilan sosial. CritLib menantang asumsi netralitas dalam praktik kepastakawanan dan mendorong pustakawan untuk secara kritis mengevaluasi peran perpustakaan dalam sistem kekuasaan yang lebih luas.

Salah satu aspek penting dari keadilan sosial yang menjadi perhatian perpustakaan umum adalah keadilan informasi. Konsep ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi dan sumber daya perpustakaan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau kemampuan fisik. Perpustakaan umum diharapkan dapat menjadi ruang inklusif yang merangkul keberagaman dan memberikan layanan yang relevan dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat.

Namun, penerapan keadilan sosial dalam praktik perpustakaan tidak selalu mudah. Terdapat berbagai tantangan dan dilema yang perlu dihadapi, mulai dari isu pendanaan, kesenjangan digital, hingga perdebatan mengenai netralitas dan aktivisme dalam kepastakawanan. Oleh karena itu, penting bagi perpustakaan umum untuk terus mengembangkan strategi dan inovasi yang dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan mewujudkan keadilan sosial dalam layanan perpustakaan.

. Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang nilai dan dampak perpustakaan umum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penilaian nilai perpustakaan umum menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

5. 1. 3. 1 Pentingnya Penilaian Nilai Perpustakaan Umum

Penilaian nilai perpustakaan umum memiliki beberapa tujuan penting:

Pentingnya Penilaian Nilai Perpustakaan Umum (Sin & Vakkari, 2015)¹⁵⁰

Penilaian nilai perpustakaan umum memiliki beberapa tujuan penting:

¹⁵⁰ Sin, S. C. J., & Vakkari, P. (2015). Perceived outcomes of public libraries in the US. *Library & information science research*, 37(3), 209-219.

- a. Memahami Dampak: Penilaian memungkinkan perpustakaan untuk mengukur dampak nyata mereka terhadap masyarakat, baik dalam hal peningkatan literasi, akses informasi, pengembangan masyarakat, maupun kontribusi ekonomi (Holt dan Elliott, 2003)¹⁵¹. Dengan memahami dampak ini, perpustakaan dapat mengidentifikasi program dan layanan yang paling efektif dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.
- b. Meningkatkan Layanan: Meningkatkan Layanan: Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan, perpustakaan dapat melakukan perbaikan dan inovasi untuk memberikan layanan yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat (Moran, B. B., & Morner, C. J. (2017)¹⁵². Penilaian nilai dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan dan harapan pengguna, sehingga perpustakaan dapat menyesuaikan layanan mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan tersebut (Hernon, P., & Altman, E. (2010).)¹⁵³.
- c. Mendapatkan Dukungan: Hasil penilaian yang positif dapat digunakan untuk mengadvokasi kepentingan perpustakaan kepada pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas (Americans for Libraries Council, 2006)¹⁵⁴. Dengan menunjukkan bukti konkret tentang dampak positif perpustakaan, mereka dapat memperoleh dukungan finansial dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan layanan mereka.
- d. Akuntabilitas Publik: Penilaian menunjukkan komitmen perpustakaan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam penggunaan anggaran dan sumber daya (Bertot, 2014).¹⁵⁵ Dengan melaporkan hasil penilaian kepada publik, perpustakaan dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

5.1.3.2 Berbagai Perspektif Dalam Penilaian Nilai Perpustakaan Umum

Penilaian nilai perpustakaan umum dapat dilakukan dari berbagai perspektif, masing-masing memberikan wawasan unik tentang kontribusi dan dampak perpustakaan terhadap masyarakat. Beberapa perspektif utama meliputi:

- a. **Perspektif Ekonomi:** Perspektif ini berfokus pada nilai ekonomi perpustakaan, yaitu kontribusi langsung dan tidak langsung perpustakaan terhadap perekonomian

¹⁵¹ Holt, G. E., & Elliott, D. (2003). Measuring outcomes: Applying cost-benefit analysis to middle-sized and smaller public libraries.

¹⁵² Moran, B. B., & Morner, C. J. (2017). *Library and information center management*. Bloomsbury Publishing USA.

¹⁵³ Hernon, P., & Altman, E. (2010). *Assessing service quality: Satisfying the expectations of library customers*. American Library Association.

¹⁵⁴ Americans for Libraries Council. (2006). *From awareness to funding: A fundraising guide for libraries*. Chicago: American Library Association

¹⁵⁵ Bertot, J. C., Real, B., Lee, J., McDermott, A. J., & Jaeger, P. T. (2015). *2014 digital inclusion survey: Survey findings and results*. College Park, MD: Information Policy & Access Center, College of Information Studies, University of Maryland.

lokal dan nasional. Analisis ekonomi dapat digunakan untuk mengukur dampak perpustakaan terhadap pendapatan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi (American Library Association, 2018).¹⁵⁶ Hal ini sejalan dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik yang tercantum dalam Pedoman Menpan No. 5 Tahun 2023, Pasal 16e.

b. **Perspektif Sosial:** Perspektif ini melihat perpustakaan sebagai lembaga sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Penilaian sosial dapat mengukur dampak perpustakaan terhadap peningkatan literasi, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat (Zickuhr, 2010).¹⁵⁷ Perspektif ini tercermin dalam penekanan pada partisipasi masyarakat dalam proses penilaian dan penyusunan standar pelayanan yang diatur dalam Permen PANRB No. 29 Tahun 2022 dan Pedoman Menpan No. 5 Tahun 2023.

c. **Perspektif Pengguna:** Perspektif ini berfokus pada pengalaman dan persepsi pengguna tentang nilai perpustakaan. Survei kepuasan pengguna, wawancara, dan kelompok fokus dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang kualitas layanan, koleksi, dan program perpustakaan (Hernon & Dugan, 2002)¹⁵⁸. Pengukuran kepuasan pengguna ini sejalan dengan instrumen penilaian F-03 dan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang diamanatkan dalam Permen PANRB No. 29 Tahun 2022 dan Pedoman Menpan No. 5 Tahun 2023. Skala Likert dapat menjadi salah satu metode untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna.

d. **Perspektif Pemangku Kepentingan:** Perspektif ini melibatkan penilaian nilai perpustakaan dari sudut pandang berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pemberi dana, mitra komunitas, dan staf perpustakaan (Sørensen, K. M., 2022).¹⁵⁹ Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, survei, dan diskusi kelompok untuk memahami harapan dan kebutuhan mereka terhadap perpustakaan. Perspektif ini sejalan dengan fokus pada kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan dan penilaian layanan publik yang disebutkan dalam Permen PANRB No. 29 Tahun 2022 dan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023. Perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective) dalam pengukuran kinerja perpustakaan melibatkan penilaian nilai perpustakaan dari berbagai sudut pandang. Crawford (2000) menekankan pentingnya perspektif penyandang dana, yang ingin memastikan investasi mereka memberikan manfaat yang diharapkan¹⁶⁰. Sementara itu, Linley dan Usherwood (1998) menyoroti perspektif pemerintah,

¹⁵⁶ American Library Association, & Public Library Association. (2018). *From awareness to funding: voter perceptions and support of public libraries in 2018*. OCLC.

¹⁵⁷ Zickuhr, K. (2011). *Generations and their gadgets* (hlm.2013). Washington, DC: Pew Internet & American Life Project.

¹⁵⁸ Dugan, R. E., & Hernon, P. (2002). Outcomes assessment: Not synonymous with inputs and outputs. *The Journal of Academic Librarianship*, 28(6), 376-380.

¹⁵⁹ Sørensen, K. M. (2022). The Value of Public Libraries: Exploring the Perceptions of Stakeholders.

¹⁶⁰ Crawford, J. (2000). *Evaluation of library and information services* (2nd ed.). Aslib Publishing

terutama dalam konteks perpustakaan umum, yang diharapkan dapat mendukung tujuan sosial dan ekonomi pemerintah daerah.¹⁶¹

Selain itu, perspektif mitra komunitas juga penting dalam mengukur kinerja perpustakaan. **Sørensen (2022)** menyoroti pentingnya memahami persepsi berbagai pemangku kepentingan tentang nilai perpustakaan, termasuk mitra komunitas, untuk menyesuaikan layanan dan program agar lebih efektif.¹⁶² Kemitraan dengan organisasi dan kelompok masyarakat memungkinkan perpustakaan menyediakan layanan yang relevan dengan kebutuhan komunitas.

Terakhir, Town (2011) menegaskan bahwa perspektif staf perpustakaan juga krusial. Sumber daya manusia dianggap sebagai aset berharga, dan pengukuran kinerja perlu mempertimbangkan kontribusi staf terhadap nilai dan dampak perpustakaan. Dengan melibatkan staf, perpustakaan dapat memperoleh wawasan tentang peningkatan layanan dan program, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja staf.¹⁶³

e. **Perspektif Berbasis Hasil (Outcome-Based Evaluation):** Pendekatan ini berfokus pada pengukuran hasil atau dampak jangka panjang dari layanan dan program perpustakaan (Araújo & Melo, 2017). Ini melibatkan penggunaan indikator kinerja kunci (KPI) dan data longitudinal untuk melacak perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku pengguna sebagai hasil dari interaksi mereka dengan perpustakaan. Perspektif ini sejalan dengan fokus pada pemantauan dan evaluasi kinerja yang tercantum dalam Permen PANRB No. 29 Tahun 2022 dan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023.

Dalam praktiknya, penerapan OBE melibatkan identifikasi hasil yang diharapkan dan pengembangan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) untuk mengukur kemajuan pencapaian hasil tersebut **Poll dan Payne (2006)** mengakui bahwa proses ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menghubungkan perubahan kondisi atau perilaku pengguna secara langsung dengan penggunaan perpustakaan¹⁶⁴. Meskipun demikian, OBE mendorong perpustakaan untuk tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, seperti peningkatan keterampilan mencari informasi atau penggunaan sumber daya elektronik, tetapi juga pada dampak jangka panjang yang lebih luas. Poll (2003a) mengilustrasikan hal ini dengan menekankan pentingnya mengukur

¹⁶¹ Linley, R., & Usherwood, B. (1998). *New measures for the new library: a social audit of public libraries*. British Library.

¹⁶² Sørensen, K. M. (2022). The Value of Public Libraries: Exploring the Perceptions of Stakeholders.

¹⁶³ Town, S. (2011). Value, impact, and the transcendent library: Progress and pressures in performance measurement and evaluation. *Library Quarterly*, 81(1), 111–125.

¹⁶⁴ Poll, R., & Payne, P. (2006). Impact measures for libraries and information services. *Library Hi Tech*, 24(4), 547-562.

peningkatan literasi informasi, keberhasilan akademik, dan kesejahteraan pengguna sebagai hasil dari layanan perpustakaan.¹⁶⁵

Lebih lanjut, OBE juga mendorong perpustakaan untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat, terutama dalam konteks perpustakaan umum. Linley dan Usherwood (1998) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa perpustakaan umum memiliki peran penting dalam menciptakan modal sosial (social capital) di masyarakat. Modal sosial ini kemudian berkontribusi pada kohesi sosial, partisipasi masyarakat, dan nilai-nilai bersama. Dengan demikian, OBE tidak hanya berfokus pada hasil individu, tetapi juga pada dampak yang lebih luas dari perpustakaan terhadap masyarakat secara keseluruhan¹⁶⁶

5.1.3.3 Metode Dan Alat Penilaian Nilai Perpustakaan Umum

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur komprehensif yang digunakan di Indonesia untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk perpustakaan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bertugas untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. IPP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 29 Tahun 2022, yang merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya (PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017).

Terdapat berbagai metode dan alat yang dapat digunakan untuk menilai nilai perpustakaan umum, antara lain:

- a. Analisis Biaya-Manfaat (*Cost-Benefit Analysis*): Metode ini membandingkan biaya operasional perpustakaan dengan manfaat yang diterima masyarakat (Griffiths & King, 2008). Manfaat ini dapat diukur secara kuantitatif, seperti peningkatan pendapatan masyarakat atau penghematan biaya pendidikan, atau kualitatif, seperti peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Sementara itu, di Amerika Serikat, kualitas layanan publik diukur dari biaya-manfaat, termasuk kebutuhan akan akuntabilitas dan memberikan bukti untuk mendapatkan dukungan dari para advokat dan pejabat terpilih (Americans for Libraries Council, 2006)¹⁶⁷. Holt dan Elliott (2003) menyarankan bahwa perpustakaan harus melaporkan lebih dari sekadar apa yang mereka lakukan; perpustakaan

¹⁶⁵ Poll, R. (2003). Measuring impact and outcome of libraries. *Performance measurement and metrics*, 4(1), 5-12.

¹⁶⁶ Linley, R., & Usherwood, B. (1998). *New measures for the new library: a social audit of public libraries*. British Library.

¹⁶⁷ Americans for Libraries Council. (2006). *From awareness to funding: A fundraising guide for libraries*. Chicago: American Library Association

perlu menjelaskan manfaat nyata apa yang mereka berikan kepada komunitas mereka.¹⁶⁸

- b. Evaluasi Kontingen (*Contingent Valuation*): Metode ini mengukur kesediaan masyarakat untuk membayar (melalui pajak atau donasi) untuk mempertahankan atau meningkatkan layanan perpustakaan (Griffiths & King, 2008).¹⁶⁹ Hasilnya memberikan indikasi nilai perpustakaan dari perspektif masyarakat.
- c. Analisis Dampak Ekonomi Sekunder (*Economic Impact Analysis*): Metode ini mengukur kontribusi perpustakaan terhadap ekonomi lokal, seperti peningkatan pendapatan bisnis lokal akibat keberadaan perpustakaan atau peningkatan nilai properti di sekitar perpustakaan (American Library Association, 2018).¹⁷⁰
- d. Survei Kepuasan Pengguna: Metode ini mengumpulkan umpan balik dari pengguna layanan mengenai pengalaman dan tingkat kepuasan mereka terhadap layanan perpustakaan (Hernon & Dugan, 2002).¹⁷¹ Hasilnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengukur dampak perpustakaan terhadap kepuasan pengguna.
- e. Peringkat Perpustakaan Umum Amerika (*Hennen's American Public Library Ratings*): Metode ini menggunakan skala lima belas item untuk menilai perpustakaan umum di Amerika Serikat dalam lima bidang: sirkulasi, staf, bahan, layanan referensi, dan tingkat pendanaan (Hennen's American Public Library Ratings, 2016).¹⁷²
- f. LJ Index of Public Library Service: Indeks ini mengukur kinerja perpustakaan umum di Amerika Serikat dalam tujuh kategori utama, yaitu kunjungan per kapita, kunjungan berulang per kapita, kunjungan ke situs web per kapita, peminjaman per kapita, peminjaman digital per kapita, program publik per kapita, dan kunjungan program per kapita (Frazer, C. (2013).)¹⁷³

5. 1. 3. 4 Metode Kualitatif Dalam Pengukuran Kinerja Perpustakaan

Berbagai metode kualitatif dapat digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai persepsi dan kebutuhan pengguna perpustakaan, melengkapi data kuantitatif yang telah diperoleh sebelumnya. Studi oleh Sin dan Vakkari (2015) menunjukkan bahwa individu dalam studi nasional percaya bahwa perpustakaan

¹⁶⁸ Holt, G. E., & Elliott, D. (2003). Measuring outcomes: Applying cost-benefit analysis to middle-sized and smaller public libraries.

¹⁶⁹ Griffiths, J. M., & King, D. W. (1993). Special libraries: increasing the information edge. In *Special libraries: increasing the information edge* (hlm.197-197).

¹⁷⁰ American Library Association, & Public Library Association. (2018). *From awareness to funding: voter perceptions and support of public libraries in 2018*. OCLC.

¹⁷¹ Dugan, R. E., & Hernon, P. (2002). Outcomes assessment: Not synonymous with inputs and outputs. *The Journal of Academic Librarianship*, 28(6), 376-380.

¹⁷² Hennen, T. J. (2010). Hennen's American public library ratings. *www.haplr-index.com* (accessed Aug. 23, 2016).

¹⁷³ Frazer, C. (2013). An Examination of Youth Services in Public Libraries. *B Sides: Fieldwork*, 2013(1).

umum bermanfaat bagi mereka terutama di bidang membaca, pendidikan mandiri, sejarah dan masyarakat, dan kesehatan. Kategori lain yang ditemukan bermanfaat termasuk bidang yang berhubungan dengan pekerjaan (misalnya, mencari pekerjaan, peluang pendidikan), dan kegiatan sehari-hari seperti pengasuhan anak, hubungan, dan masalah konsumen dan hukum.¹⁷⁴ Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, perpustakaan umum dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kinerja mereka dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berikut ini adalah beberapa metode kualitatif yang dapat digunakan:

- a. Kelompok Fokus (Focus Groups): Metode ini melibatkan diskusi terarah dengan sekelompok pengguna perpustakaan untuk menggali informasi mendalam tentang pengalaman, opini, dan saran mereka terkait layanan perpustakaan. Kelompok fokus dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pengguna memandang perpustakaan dan apa yang mereka harapkan dari layanan yang diberikan (Krueger & Casey, 2009¹⁷⁵).
- b. Wawancara (Interviews): Wawancara mendalam dengan pengguna perpustakaan dapat memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang pengalaman individu, motivasi, dan kebutuhan mereka. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, atau semi terstruktur (Bloor & Wood, 2006)¹⁷⁶.
- c. Kotak Saran/Skema Komentar/Evaluasi: Metode ini memberikan saluran bagi pengguna untuk memberikan umpan balik secara anonim atau terbuka tentang pengalaman mereka di perpustakaan. Umpan balik ini dapat berupa saran, kritik, atau pujian, dan dapat memberikan wawasan berharga tentang area-area yang perlu ditingkatkan.
- d. Observasi: Dengan mengamati perilaku pengguna di perpustakaan, pustakawan dapat memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan ruang, koleksi, dan layanan perpustakaan. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui rekaman video, dan dapat memberikan informasi tentang pola penggunaan, kebutuhan pengguna, dan potensi masalah yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain (Crawford, 2006)¹⁷⁷.
- e. Jurnal Reflektif dan Buku Harian: Metode ini melibatkan pengguna perpustakaan untuk mencatat pengalaman, pemikiran, dan perasaan mereka

¹⁷⁴ Sin, S. C. J., & Vakkari, P. (2015). Perceived outcomes of public libraries in the US. *Library & information science research*, 37(3), 209-219.

¹⁷⁵ Krueger, R. A. (2014). *Focus groups: A practical guide for applied research*. Sage publications.

¹⁷⁶ Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts.

¹⁷⁷ Crawford, J. (2006). *The culture of evaluation in library and information services*. Elsevier.

- terkait penggunaan perpustakaan. Jurnal reflektif dan buku harian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengguna memandang perpustakaan dan bagaimana layanan perpustakaan memengaruhi mereka (Pickard, 2006)¹⁷⁸
- f. Benchmarking: Membandingkan kinerja perpustakaan dengan perpustakaan lain yang serupa dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang perlu ditingkatkan. Benchmarking dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membandingkan statistik penggunaan, survei kepuasan pengguna, atau praktik manajemen (Brophy, 2006).¹⁷⁹
 - g. Pengalaman Pengguna (User Experience/UX): Metode ini berfokus pada pemahaman pengalaman pengguna secara holistik, termasuk aspek emosional, kognitif, dan perilaku mereka saat menggunakan layanan perpustakaan. UX melibatkan penggunaan berbagai teknik penelitian, seperti observasi, wawancara, dan pengujian kegunaan, untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan perpustakaan dan bagaimana pengalaman tersebut dapat ditingkatkan (Borg, M. 2016).¹⁸⁰

5. 1. 3. 5 Tantangan Dan Peluang Dalam Penilaian Nilai Perpustakaan Umum

Meskipun penting, penilaian nilai perpustakaan umum menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya standar data dan teknik penilaian yang konsisten, baik di tingkat nasional maupun internasional (Imholz & Arns, 2007)¹⁸¹. Hal ini menyulitkan perpustakaan untuk membandingkan hasil penilaian mereka dengan perpustakaan lain, serta mempersulit pengumpulan data yang komprehensif dan representatif.

Selain itu, perpustakaan umum juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya penilaian dan teknik penilaian yang tepat (Imholz & Arns, 2007)¹⁸². Banyak pustakawan yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan penilaian nilai. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan penilaian yang efektif dan akurat.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia (Aabø, Audunson, & Vårheim, 2010)¹⁸³. Penilaian nilai yang komprehensif

¹⁷⁸ Pickard, A. J. (2013). *Research methods in information*. Facet publishing.

¹⁷⁹ Brophy, P. (2006). *Measuring library performance: principles and techniques*. Facet publishing.

¹⁸⁰ Borg, M. (2016). *User Experience in Libraries: Applying Ethnography and Human-Centred Design*. Routledge.

¹⁸¹ Aabø, S., Audunson, R., & Vårheim, A. (2010). How do public libraries function as meeting places?. *Library & information science research*, 32(1), 16-26.

¹⁸² Imholz, S., & Arns, J. W. (2007). Worth Their Weight: An assessment of the evolving field of library valuation.

¹⁸³ Aabø, S., Audunson, R., & Vårheim, A. (2010). How do public libraries function as meeting places?. *Library & information science research*, 32(1), 16-26

membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Perpustakaan umum, terutama yang berukuran kecil atau memiliki anggaran terbatas, mungkin kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk melakukan penilaian secara menyeluruh.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat juga peluang untuk meningkatkan praktik penilaian nilai perpustakaan umum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih efisien dan efektif. Selain itu, kolaborasi antara perpustakaan, akademisi, dan organisasi profesional dapat membantu mengembangkan standar dan metodologi penilaian yang lebih baik.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, perpustakaan umum dapat meningkatkan kualitas penilaian nilai mereka, sehingga dapat lebih memahami dampak mereka terhadap masyarakat dan membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan layanan mereka.

5. 1. 4 Menutupi Kesenjangan Digital

Secara teori, kemajuan digitalisasi dalam perpustakaan dan akses ke sumber informasi memberikan potensi yang luar biasa. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi atau menguasai penggunaannya. Ironisnya, digitalisasi juga dapat memperdalam kesenjangan sosial yang ada, menciptakan ketidakadilan yang lebih besar (Cancro 2016)¹⁸⁴. Kesenjangan digital menggambarkan ketidaksetaraan antara mereka yang memiliki akses dan pemahaman terhadap teknologi dengan mereka yang tidak. Pengetahuan teknologi menjadi krusial untuk keberhasilan di berbagai aspek kehidupan (IPAC 2014).¹⁸⁵

Meskipun terjadi kemajuan pesat dalam penggunaan teknologi secara umum, kelompok-kelompok yang masih kekurangan akses, keterampilan, dan teknologi komunikasi cenderung memiliki karakteristik yang serupa, seperti status sosial ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, tinggal di daerah pedesaan, atau merupakan warga lanjut usia (Anderson dan Kumar 2019)¹⁸⁶. Perhatian khusus juga diberikan pada imigran baru-baru ini. Penelitian oleh Fairlie (2017) menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan ketimpangan akses terhadap teknologi adalah pendapatan rendah dan tingkat pendidikan yang rendah¹⁸⁷. Gonzales (2016) mencatat bahwa bagi kelompok berpenghasilan rendah, masalah khusus timbul

¹⁸⁴ Cancro, P. (2016). The dark (ish) side of digitization: Information equity and the digital divide. *The Serials Librarian*, 71(1), 57-62.

¹⁸⁵ IPAC (Information Policy and Access Center). 2014. 2013 Digital Inclusion Survey: Survey Findings and Results Executive Summary

¹⁸⁶ Anderson, Monica, and Madhumitha Kumar. 2019. "Digital Divide Persists Even as Lower-Income Americans Make Gains in Tech Adoption."

¹⁸⁷ Fairlie, R. W. (2017). Have we finally bridged the digital divide? Smart phone and Internet use patterns by race and ethnicity.

karena ketidakmampuan untuk mempertahankan teknologi akibat layanan terputus dan kerusakan perangkat keras¹⁸⁸. Temuan oleh Horrigan (2019) menunjukkan bahwa meskipun ada persepsi umum bahwa kurangnya akses broadband/internet adalah masalah di daerah pedesaan, ternyata hampir tiga kali lebih banyak penduduk perkotaan dan daerah metropolis yang tidak memiliki akses tersebut.¹⁸⁹

Kesenjangan digital menjadi sorotan utama selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dengan penutupan sekolah, lembaga pemerintah, dan tempat usaha fisik yang penting, akses internet menjadi sangat penting. Akses ke pengumuman pemerintah, informasi kesehatan, situs web manfaat, sumber daya telehealth, belanja online, dan layanan pemerintah seperti bantuan pengangguran semuanya memerlukan akses internet. Sayangnya, mereka yang tidak memiliki komputer, keterampilan komputer, atau akses broadband, termasuk orang tua dan anak-anak usia sekolah, mengalami hambatan atau bahkan kehilangan akses tersebut.¹⁹⁰

Maceviciute dan Wilson (2018) menyoroti kompleksitas sifat kesenjangan digital, yang tidak bisa hanya dilihat sebagai ada atau tidak ada akses ke teknologi. Mereka mengidentifikasi tiga tingkat ketidaksetaraan yang terkait: tingkat pertama melibatkan individu yang tidak memiliki sumber daya finansial dan akses fisik ke internet serta komputer dalam kehidupan sehari-hari dan tempat kerja; tingkat kedua melibatkan ketidaksetaraan dalam keterampilan digital dan penggunaan internet, serta perbedaan motivasi untuk menggunakannya (penelitian Dutton dan Reisdorf [2019] menemukan bahwa sikap terhadap internet memengaruhi kesenjangan digital, di mana "orang-orang yang meragukan digital" -- yaitu mereka yang meragukan nilai internet dan khawatir akan risikonya -- jauh lebih cenderung tidak mencari akses tersebut); dan tingkat ketiga melibatkan perbedaan dalam kemampuan kelompok-kelompok tertentu untuk secara efektif memanfaatkan teknologi¹⁹¹. Perbedaan ini dapat diukur dalam hal waktu dan frekuensi penggunaan, keragaman dan kualitas aplikasi yang digunakan, serta manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi (Maceviciute dan Wilson 2018, 273)¹⁹². Individu dengan pendidikan tinggi, misalnya, cenderung memperoleh manfaat ekonomi, politik, pendidikan, dan pekerjaan yang lebih besar dari penggunaan internet dan teknologi dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

¹⁸⁸ Gonzales, R. G. (2016). *Lives in limbo: Undocumented and coming of age in America*. Univ of California Press.

¹⁸⁹ Horrigan, J. B. (2019). Analysis: Digital Divide Isn't Just a Rural Problem. *The Daily Yonder*

¹⁹⁰ Horrigan, J. B. (2019). *Ibid*

¹⁹¹ Maceviciūtė, E., & Wilson, T. D. (2018). Digital means for reducing digital inequality: Literature review. *Informing science: the international journal of an emerging transdiscipline*, 21, 269-287.

¹⁹² Maceviciute, Elena, and Tom Wilson. 2018. "Digital Means for Reducing Digital Inequality: Literature Review." *Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline* 21:269–87.

Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan digital adalah dengan meningkatkan literasi digital. Literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital, termasuk teknologi (seperti komputer) dan layanan terkait (Jaeger et al. 2012, 5) ¹⁹³. Hildreth (2013) memperkirakan bahwa lebih dari 100 juta orang, atau sepertiga dari populasi, memiliki buta huruf digital. ¹⁹⁴ Horrigan (2014) melaporkan bahwa 29% penduduk Amerika memiliki tingkat keterampilan digital yang rendah, 42% memiliki tingkat keterampilan digital yang cukup baik, dan 29% memiliki tingkat keterampilan digital yang tinggi. ¹⁹⁵ .

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi buta huruf digital adalah konsep "inklusi digital", yang melibatkan komitmen masyarakat dan lembaga seperti perpustakaan untuk mengurangi kesenjangan digital bagi semua individu yang mengalaminya. National Digital Inclusion Alliance (NDIA) mendefinisikan inklusi digital sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan komunitas, terutama yang kurang beruntung, memiliki akses dan penggunaan yang setara terhadap Teknologi Komunikasi Informasi (TIK). Konsep ini mencakup lima elemen penting:

- 1) Layanan internet broadband yang terjangkau dan dapat diandalkan.
- 2) Perangkat yang mampu terhubung ke internet dan sesuai kebutuhan.
- 3) Akses ke pelatihan literasi digital.
- 4) Dukungan teknis berkualitas.
- 5) Aplikasi dan konten online yang mempromosikan kemandirian, partisipasi, dan kolaborasi. (NDIA 2019, 1).)¹⁹⁶

Dengan menerapkan pendekatan inklusi digital ini, diharapkan kesenjangan digital dapat dikurangi dan semua individu dapat memanfaatkan manfaat teknologi secara merata. Perpustakaan, sebagai bagian dari upaya inklusi digital, dapat memainkan peran penting dalam menyediakan akses, pelatihan, dan dukungan kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital mereka dan memanfaatkan teknologi dengan lebih baik.

Perpustakaan memainkan peran penting dalam menyediakan layanan literasi digital yang membantu individu menguasai teknologi informasi dan komunikasi (ALA 2014a). Mereka menawarkan program dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengembangan lapangan kerja, dan keterlibatan masyarakat.

¹⁹³ Jaeger, P. T., Bertot, J. C., Kodama, C. M., Katz, S. M., & DeCoster, E. J. (2012). Describing and Measuring the Value of Public Libraries: The Growth of the Internet and the Evolution of Library Value. *First Monday*, 16(11). Retrieved from www.firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3765.

¹⁹⁴ Hildreth, S. (2013). Inspiring Libraries as Community Anchors. *National Civic Review*, (Winter), 44-47.

¹⁹⁵ Hildreth, S. (2013). *Ibid*

¹⁹⁶ National Digital Inclusion Alliance. (2019). Definitions. Retrieved from <https://www.digitalinclusion.org/definitions>

Bukti menunjukkan bahwa perpustakaan telah berkontribusi signifikan dalam membangun masyarakat inklusif secara digital. Hampir semua perpustakaan umum menyediakan akses internet dan Wi-Fi gratis, membantu dalam keterampilan dasar internet, memberikan akses ke e-book, menyelenggarakan pelatihan teknologi, dan membantu orang mengisi formulir online atau mengerjakan tugas sekolah (ALA 2019a)¹⁹⁷.

Meskipun masalah akses telah berkurang, tantangan lain seperti kesenjangan dalam kesiapan digital masih ada. Horrigan (2014) menekankan bahwa perpustakaan perlu fokus pada "kesiapan digital", yaitu kemampuan individu untuk terlibat dengan sumber daya online secara efektif, bukan hanya literasi digital dasar.

NDIA mendefinisikan "ekuitas digital" sebagai kondisi di mana semua individu memiliki kapasitas teknologi informasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat (NDIA 2019). Membantu menciptakan masyarakat yang adil secara digital adalah tanggung jawab fundamental perpustakaan sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap keadilan sosial (Lonial 2018).

Perpustakaan umum memiliki peran penting dalam mempromosikan pengetahuan dan keterampilan digital, yang pada gilirannya membantu menciptakan konsumen yang cerdas dan warga negara yang terinformasi. Peran ini terus berkembang dan menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi.

5. 1. 5 SENSOR DAN PELARANGAN BUKU DI PERPUSTAKAAN

Praktik sensor dan pelarangan buku telah lama menjadi isu kontroversial dalam sejarah perpustakaan umum (Wiegand, 1996)¹⁹⁸. Berbagai pihak, mulai dari individu hingga pemerintah, berupaya membatasi akses terhadap materi yang dianggap tidak sesuai atau berbahaya. Upaya ini sering menasar materi yang berkaitan dengan orientasi seksual atau konten yang dianggap tidak pantas untuk anak muda.

Meskipun ada tekanan untuk melakukan sensor, para profesional perpustakaan seringkali menghadapi dilema etika. Di satu sisi, mereka harus menjalankan peran perpustakaan sebagai penyedia akses informasi yang setara bagi semua orang. Di sisi lain, ada tekanan untuk membatasi akses terhadap materi tertentu demi melindungi kelompok tertentu atau menjaga nilai-nilai tertentu dalam masyarakat.

Perpustakaan umum memiliki peran krusial dalam menyediakan akses informasi yang inklusif bagi semua orang, tanpa memandang orientasi seksual atau latar belakang lainnya. Oleh karena itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang beragam dan inklusif, serta layanan pendukung bagi mereka yang membutuhkan.

¹⁹⁷ ALA (American Library Association). (2019a). ALA Library Fact Sheet 1. Retrieved from libguides.ala.org/numberoflibraries.

¹⁹⁸ Wiegand, W. A. (1996). *Irrepressible reformer: A biography of Melvil Dewey*. American Library Association.

Kebijakan pelarangan buku juga diterapkan di perpustakaan nasional, di mana akses terhadap buku-buku tertentu dibatasi berdasarkan usia dan kepentingan pembaca (Wahyuni, 2023)¹⁹⁹. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk melindungi kelompok tertentu, seperti anak-anak, dari konten yang dianggap tidak sesuai.

Undang-undang juga berperan dalam mengatur batasan akses terhadap konten tertentu, terutama di internet. Tujuannya adalah melindungi anak-anak dari konten yang berpotensi membahayakan, sambil tetap memastikan mereka dapat mengakses informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan usia mereka.

Tujuan penyensoran di perpustakaan umum dapat beragam, tergantung pada perspektif dan motivasi individu atau kelompok yang terlibat. Beberapa tujuan umum meliputi:

- 1) **Melindungi anak-anak:** Tujuan utama penyensoran adalah melindungi anak-anak dari materi yang dianggap tidak pantas, seperti kekerasan atau pornografi.
- 2) **Mempertahankan moralitas dan nilai-nilai tertentu:** Penyensoran dapat dilakukan untuk menjaga moralitas atau nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, dengan membatasi akses terhadap materi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
- 3) **Membatasi informasi sensitif atau rahasia:** Penyensoran dapat dilakukan untuk melindungi informasi yang dianggap sensitif atau rahasia, seperti informasi yang dapat membahayakan keamanan nasional.
- 4) **Mencegah pengaruh negatif atau merugikan:** Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari konten yang dianggap dapat merusak kesehatan mental, mempromosikan kekerasan, atau memberikan informasi yang tidak akurat.
- 5) **Menjaga kepatuhan hukum:** Perpustakaan umum harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk pembatasan terhadap materi yang melanggar hak cipta atau undang-undang lainnya.

Penting untuk diingat bahwa tujuan penyensoran seringkali menjadi subjek perdebatan dan kontroversi. Isu-isu kebebasan berbicara, akses informasi, dan hak individu untuk mengakses materi yang mereka inginkan menjadi pertimbangan penting dalam diskusi ini

5. 2 Peluang Dan Inovasi Perpustakaan Umum.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, perpustakaan umum di Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi dan berinovasi. Perpustakaan tidak hanya dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi, tetapi juga untuk mengembangkan inisiatif baru yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

¹⁹⁹ Wahyuni, S. (2023). Analisis Sensor dan Pelarangan Buku Pada Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta. *JIPIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, 2(2), 129-136.

Peluang dan inovasi yang dapat dilakukan oleh perpustakaan umum sangatlah beragam, mulai dari pemanfaatan teknologi digital hingga pengembangan program dan layanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan peluang ini, perpustakaan umum dapat memperluas jangkauannya, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Beberapa peluang dan inovasi yang dapat dilakukan oleh perpustakaan umum antara lain:

5.2.1 Menyediakan Akses Ke Berbagai Konten Digital

Perpustakaan umum memiliki peran krusial dalam menjembatani kesenjangan digital dengan menyediakan akses terhadap konten digital dan layanan literasi digital. American Library Association (ALA, 2014a) mencatat bahwa perpustakaan umum dapat membantu individu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kemampuan menavigasi, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan konten digital.²⁰⁰

Hampir semua perpustakaan umum di Amerika Serikat menyediakan akses internet dan Wi-Fi gratis, membantu keterampilan dasar internet, memberikan akses ke e-book, menyelenggarakan pelatihan teknologi, dan membantu masyarakat dalam mengisi formulir online atau mengerjakan tugas sekolah (ALA 2019a).²⁰¹ Di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) telah mengembangkan platform digital yang menyediakan akses ke berbagai koleksi digital, termasuk buku, majalah, jurnal, dan naskah kuno.

Meskipun masalah akses telah berkurang, tantangan kesenjangan digital lainnya masih ada. Horrigan (2014) menekankan bahwa perpustakaan perlu fokus pada "kesiapan digital," yaitu kemampuan individu untuk terlibat dengan sumber daya online secara efektif, bukan hanya literasi digital dasar.²⁰² National Digital Inclusion Alliance (NDIA) mendefinisikan "ekuitas digital" sebagai kondisi di mana semua individu memiliki kapasitas teknologi informasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat (NDIA, 2019)²⁰³

Perpustakaan umum, dengan peran mereka sebagai pusat komunitas dan penyedia layanan informasi, memiliki posisi unik untuk menjembatani kesenjangan ini. Dengan berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, mengembangkan program literasi digital yang relevan, dan berkolaborasi dengan mitra komunitas lainnya, perpustakaan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara

²⁰⁰ ALA (American Library Association). (2014a). *Digital Inclusion Builds Communities Today (and Tomorrow)*. Chicago: American Library Association.

²⁰¹ ALA (American Library Association). (2019a). ALA Library Fact Sheet 1. Retrieved from libguides.ala.org/numberoflibraries.

²⁰² Horrigan, J. B. (2014). *Digital Readiness: Nearly One-Third of Americans Lack the Skills to Use Next-Generation "Internet of Things" Applications*

²⁰³ NDIA (National Digital Inclusion Alliance). 2019. "Definitions." <http://www.digitalinclusion.org/definitions>

digital, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang di era digital.

5.2.2 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan literasi⁽¹ Indonesia, PNR (2023) ²⁰⁴. Program ini mengadopsi PerpuSeru dari Bill and Melinda Gates Foundation, bertujuan menciptakan perpustakaan inklusif yang mengurangi kesenjangan bekerja sama dengan Bappenas dan pihak terkait untuk mengembangkan infrastruktur, koleksi, layanan, serta program literasi. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal juga dilakukan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat.

Program ini telah berjalan sejak 2018, menargetkan perpustakaan di berbagai tingkatan, namun baru sebagian kecil yang tertransformasi. Percepatan transformasi memerlukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan sektor swasta. bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan ketersediaan layanan perpustakaan di seluruh Indonesia (<https://www.perpusnas.go.id>)²⁰⁵

Tujuan program ini sejalan dengan UNESCO Public Library Manifesto 1994, yang menekankan perpustakaan sebagai wahana demokrasi dan pusat informasi lokal. Perpustakaan memberikan layanan akses informasi terkait pendidikan, budaya, rekreasi, dan lainnya kepada semua orang, tanpa membedakan kebutuhan khusus atau kelas sosial. ²⁰⁶

Salah satu indikator keberhasilan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah jumlah masyarakat yang berpartisipasi. Pada tahun 2020, tercatat 156.191 orang mengikuti program ini, jauh melampaui target 54.000 orang, dengan tingkat pencapaian 289,24%.

Peningkatan signifikan terjadi pada partisipasi masyarakat di perpustakaan desa dan perpustakaan umum kabupaten di seluruh Indonesia, menunjukkan minat dan manfaat program ini bagi masyarakat. Tingginya partisipasi ini tidak hanya mengindikasikan minat yang besar, tetapi juga kemungkinan target yang ditetapkan terlalu rendah. Evaluasi target untuk tahun mendatang diperlukan agar sesuai dengan antusiasme masyarakat.

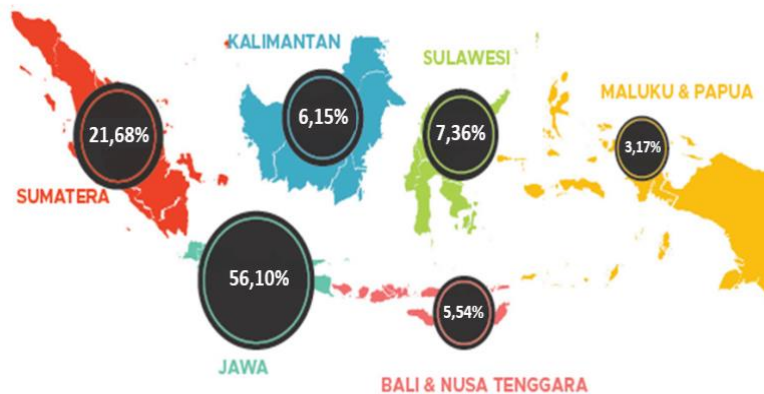
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa 56,7% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dengan proyeksi peningkatan menjadi 66,6% pada tahun 2035. Meskipun penduduk pedesaan hanya 43,3%, kepadatan penduduknya mencapai 141 jiwa/km², meningkat dari sensus sebelumnya.

²⁰⁴ Indonesia, PNR (2023).Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

²⁰⁵<https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=211115041551jKMJaTZo4h>

²⁰⁶ Kosong

Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa (56,10%), diikuti Sumatera (21,68%), Sulawesi (7,36%), Kalimantan (6,15%), Bali-Nusa Tenggara (5,54%), dan Maluku-Papua (3,17%). Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 6



(sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021)

Peta sebaran penduduk Indonesia di atas memperjelas konsentrasi penduduk di Pulau Jawa. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan program perpustakaan berbasis inklusi sosial, mengingat:

- 1) Target Partisipasi: Perluasan jangkauan program ke daerah pedesaan dan luar Jawa menjadi krusial untuk memastikan pemerataan akses.
- 2) Kebutuhan yang Beragam: Program perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap wilayah, mengingat perbedaan karakteristik penduduk di perkotaan dan pedesaan.
- 3) Aksesibilitas: Kepadatan penduduk di Jawa menuntut strategi khusus, seperti perpustakaan keliling atau penambahan cabang, untuk menjangkau masyarakat secara efektif.
- 4) Perencanaan dan Pengembangan: Data sebaran penduduk membantu perpustakaan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan merancang program yang relevan untuk setiap wilayah.

Dengan memahami sebaran penduduk, perpustakaan dapat mengembangkan program yang lebih relevan dan efektif, serta memastikan akses yang sama terhadap pengetahuan dan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia

5.2.3 Layanan Perpustakaan Kepada Disabilitas

. Para ahli seperti Jaeger dan Bertot (2015) serta Bialik (2017) telah menyoroti besarnya populasi penyandang disabilitas di Amerika Serikat, yang mencapai angka 18,7% dari total populasi. Angka ini sebanding dengan data di Indonesia, di mana menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang mengalami kesulitan

mengurus diri sendiri dan termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022, meningkat dari 16,5 juta orang pada tahun 2021. Data dari Kementerian Sosial juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat sekitar 1,3 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini mengungkap tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, termasuk kesenjangan digital dan hambatan dalam mengakses informasi.²⁰⁷

Di Indonesia, penyediaan layanan perpustakaan untuk penyandang disabilitas menjadi aspek krusial dalam memastikan inklusivitas dan akses yang setara terhadap informasi dan pengetahuan. Seiring dengan meningkatnya penekanan pada perpustakaan digital dan layanan daring, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya ini (Habibi et al. , 2022)²⁰⁸. Pandemi COVID-19 semakin menekankan pentingnya perpustakaan digital, namun juga menggarisbawahi kesenjangan akses yang mungkin dialami oleh penyandang disabilitas (Priadana & Rizal, 2021).²⁰⁹ Oleh karena itu, penting bagi perpustakaan, termasuk Perpustakaan Nasional Indonesia, untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa layanan daring mereka inklusif dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang menyandang disabilitas (Utami, 2022).²¹⁰

Untuk mengatasi tantangan ini, para ahli seperti Lewis (2013)²¹¹. dan Kowalsky & Woodruff (2017) menekankan pentingnya desain universal dalam layanan perpustakaan. Desain universal berarti merancang layanan dan fasilitas yang mengakomodasi beragam kebutuhan, termasuk penyandang disabilitas. Pelatihan staf perpustakaan tentang disabilitas dan penggunaan teknologi bantu juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan perpustakaan yang inklusif.²¹²

Di Indonesia, UU N0. 8 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas terhadap

²⁰⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020, 26 Oktober). Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas. Diakses pada 20 Januari 2022, dari <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>

²⁰⁸Habibi, A., Yaakob, M. F. M., & Sofwan, M. (2022). Student use of digital libraries during COVID-19: Structural equation modelling in Indonesian and Malaysian contexts. *The Electronic Library*, 40(4), 472-485.

²⁰⁹ Priadana, A., & Rizal, A. A. (2021). Sentiment Analysis on Government Performance in Tourism During The COVID-19 Pandemic Period With Lexicon Based. *CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi*, 7(1), 28-39.

²¹⁰ Utami, D. (2022). Optimalisasi Layanan Online Perpustakaan Nasional di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal VISI PUSTAKA*, 24(3), 205-214.

²¹¹ Lewis, J. (2013). Information Equality for Individuals with Disabilities: Does It Exist? *Library Quarterly*, 83(2), 229-235.

²¹² Kowalsky, M., & Woodruff, J. (2017). Creating Inclusive Environments: Plans for Serving Library Patrons with Disabilities. *American Libraries*, 48(March/April), 60-63.

layanan perpustakaan. Beberapa pasal yang relevan dengan pelayanan perpustakaan meliputi:

- 1) Pasal 18 (Hak Aksesibilitas): Menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik, termasuk perpustakaan, serta mendapatkan akomodasi yang layak.
- 2) Pasal 19 (Hak Pelayanan Publik): Menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan publik yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi, termasuk pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di perpustakaan tanpa biaya tambahan.
- 3) Pasal 24 (Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi): Menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, termasuk penggunaan bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif di perpustakaan.
- 4) Pasal 105, 106, 123, 124: Mewajibkan pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik, termasuk perpustakaan, untuk menyediakan pelayanan publik dan informasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Selain itu, UU UU No. 43 Tahun 2007 juga memberikan landasan hukum untuk menciptakan lingkungan perpustakaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

- 1) Pasal 5 Ayat (1) dan (3): Menjamin hak yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh layanan perpustakaan. Ayat (3) secara khusus menekankan bahwa masyarakat dengan cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak mendapatkan layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan mereka.
- 2) Pasal 2: Menetapkan asas-asas penyelenggaraan perpustakaan, termasuk keadilan dan kemitraan, yang dapat menjadi landasan untuk layanan inklusif.
- 3) Pasal 7 Ayat (1): Mengamanatkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, Americans with Disabilities Act (ADA) tahun 1990 juga melarang diskriminasi terhadap individu penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan publik, termasuk perpustakaan. ADA mewajibkan perpustakaan untuk menyediakan aksesibilitas fisik, program, dan layanan yang setara bagi penyandang disabilitas.

American Library Association (ALA) juga telah mengeluarkan kebijakan "Library Services for People with Disabilities Policy" pada tahun 2001 untuk mendorong perpustakaan menyediakan layanan, fasilitas, dan koleksi yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.²¹³

Dengan adanya regulasi yang jelas dan praktik terbaik yang terus berkembang, perpustakaan di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki peluang besar untuk

²¹³ ALA (American Library Association). (2019c). Library Services for People with Disabilities Policy

menjadi pelopor dalam inklusivitas dan aksesibilitas. Kolaborasi antara pustakawan, penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi perpustakaan yang ramah bagi semua. Penelitian lebih lanjut mengenai kebutuhan dan preferensi pengguna disabilitas di Indonesia, seperti yang dilakukan Koulikourdi (2008) di Yunani, dapat memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih inklusif dan responsif.²¹⁴ Penting juga untuk mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas. Studi seperti yang dilakukan oleh Priadana & Rizal (2021)²¹⁵ menunjukkan pentingnya perpustakaan digital dalam situasi krisis, tetapi juga menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa layanan ini dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas

5.2.4 Layanan Perpustakaan Untuk Masyarakat Adat Dan Terpencil

Indonesia, dengan kekayaan budayanya yang luar biasa, menjadi rumah bagi lebih dari 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Dari Suku Jawa yang mendominasi hingga suku-suku kecil di Kalimantan dan Papua, setiap kelompok memiliki tradisi, bahasa, dan pengetahuan unik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Namun, keberagaman ini juga menghadirkan tantangan dalam menyediakan layanan publik yang merata, termasuk layanan perpustakaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 telah mengamankan hak masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang untuk memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Amanat ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang lokasi geografis atau latar belakang budaya, memiliki akses yang setara terhadap informasi dan pengetahuan.

Di tengah keberagaman Indonesia yang kaya, masyarakat adat dan terpencil seringkali terpinggirkan, menghadapi tantangan unik dalam mengakses informasi dan layanan dasar. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk memberdayakan komunitas ini melalui layanan perpustakaan yang inklusif dan responsif. Seperti halnya perpustakaan suku di Amerika Serikat yang berperan sebagai "penjaga budaya" (Umayam, 2018)²¹⁶, perpustakaan di Indonesia dapat menjadi jembatan penghubung antara pengetahuan tradisional dan dunia modern.

²¹⁴ Koulikourdi, A. (2008). Library services for people with disabilities in Greece. *Library Review*, 57(2), 138-148.

²¹⁵ Priadana, A., & Rizal, A. A. (2021). Sentiment Analysis on Government Performance in Tourism During The COVID-19 Pandemic Period With Lexicon Based. *CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi*, 7(1), 28-39.

²¹⁶ Umayam, N. (2018). What Is Access without Equity? Addressing the Digital Divide in Communities with Endangered Languages. *American Libraries*, 49(March/April), 25.

Suku Kasepuhan Cisungsang di Banten (Framanik et al. , 2019)²¹⁷ dan Suku Dayak Meratus (Nurazizah, 2018) adalah contoh bagaimana kearifan lokal dapat dilestarikan dan dibagikan melalui inisiatif perpustakaan. ²¹⁸Pengetahuan tentang tanaman obat (Susanti et al. , 2023)²¹⁹ dan praktik penyembuhan tradisional (Suharmiati et al. , 2021) yang diwariskan turun temurun menjadi bukti kekayaan budaya yang perlu dijaga. ²²⁰ Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga menjadi ruang untuk merayakan dan mempelajari warisan leluhur.

Akses terhadap informasi yang relevan dan sesuai budaya adalah kunci pemberdayaan masyarakat adat. Program Perumahan Desa di Kabupaten Sula (Ibrahim et al. , 2020) menunjukkan bagaimana perpustakaan dapat menyediakan sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas hidup. ²²¹Literasi, seperti yang digaungkan oleh Sekolah Rimba Butet Manurung (Mulatsih & Aurora, 2021)²²², menjadi pondasi bagi partisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan (Jamin et al. , 2022). ²²³

Teknologi digital, seperti yang diusulkan oleh Stemper & Butler (2001), menawarkan solusi untuk mengatasi keterbatasan geografis. ²²⁴ Namun, tantangan akses internet yang dihadapi perpustakaan suku di Amerika Serikat (ATALM 2014b) menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan

²¹⁷ Framanik, N. A., Winangsih, R., Dimiyati, I., & Sagita, D. (2019). Traditional Communication Model of Traditional Leaders in Maintaining Local Wisdom in Custom Tribe, Kasepuhan Cisungsang, South Banten, Banten Province, Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 367, 89-92.

²¹⁸ Nurazizah, N. (2018). Pengembangan perangkat pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar berbasis kearifan lokal pada komunitas adat terpencil (KAT) Suku Dayak Meratus. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 13(2), 123-134.

²¹⁹ Susanti, Y., Supiandi, M. I., Julung, H., Zubaidah, S., & Mahanal, S. (2023). Lexicon of medicinal plants in traditional medicine in the Dayak Tamambaloh Tribe (West Kalimantan, Indonesia): An ethnolinguistic approach. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 24(1).

²²⁰ Suharmiati, S., Agustina, Z. A., & Effendi, D. (2021). Medicinal plants knowledge and traditional healing practices of mentawai indigenous people in indonesia: An ethnomedicine approach. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(3), 4191-4199.

²²¹ Ibrahim, A. H., Hafel, M., Deni, S., Madjid, S., & Fokaaya, S. (2020). Social Empowerment of Remote Indigenous Peoples: Study of Village Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration*, 4(4), 61-70.

²²² Mulatsih, M. V. E., & Aurora, V. D. (2021). Self-Regulated Learning In Butet Manurung's The Jungle School. *IJIET (International Journal of Indonesian Education and Teaching)*, 5(2), 148-157.

²²³ Jamin, M., Jaelani, A. K., Ly, D. Q., & Gershaneck, K. (2022). Legal Protection of Indigenous Community in Protected Forest Areas Based Forest City™.

²²⁴ Stemper, J. A., & Butler, J. T. (2001). Developing a model to provide digital reference services. *Reference Services Review*, 29(3), 172-189.

pelatihan literasi digital.).²²⁵ Dengan demikian, layanan referensi digital, platform pembelajaran daring, dan koleksi digital dapat menjangkau masyarakat adat di pelosok negeri.

Keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahap pengembangan layanan perpustakaan adalah kunci keberhasilan. Memahami nilai-nilai budaya, bahasa, dan tradisi lokal (Thorpe & Byrne, 2016)²²⁶ akan memastikan relevansi dan keberlanjutan program (Clar et al. , 2018)²²⁷. Prinsip penentuan nasib sendiri yang diterapkan dalam pengembangan perpustakaan suku di Amerika Serikat, di mana perpustakaan suku menjadi pusat revitalisasi budaya, bahasa, dan pengetahuan Pribumi (Littletree, 2018)²²⁸, dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Perpustakaan suku di Amerika Serikat telah berhasil menciptakan ruang bagi masyarakat adat untuk merayakan identitas budaya mereka, mengumpulkan dan melestarikan pengetahuan leluhur, serta memperkuat kedaulatan dan kemandirian mereka. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan dan pelestarian budaya bagi masyarakat adat.

Jelas masih ada kebutuhan yang kuat untuk advokasi. Materi yang dikembangkan oleh ALA (2018b) dari perspektif anggota suku mencantumkan berbagai alasan mengapa perpustakaan suku penting:

1. Perpustakaan suku.
2. Melayani peran penting dalam merevitalisasi dan melestarikan budaya suku, sejarah, dan bahasa
3. Tingkatkan literasi untuk komunitas kami
4. Bawa teknologi ke orang-orang kami
5. Penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita
Memberdayakan anggota suku
6. Bawa bahan bacaan dan berita kepada anggota suku
7. Mempromosikan kegiatan antar generasi
8. Memperkuat identitas budaya

²²⁵ ATALM (Association of Tribal Archives, Libraries, and Museums). (2014b). Digital Inclusion in Native Communities: The Role of Tribal Libraries.

²²⁶ Thorpe, K., & Byrne, A. (2016). Indigenous voices in the state library of New South Wales. *The Australian Library Journal*, 65(1), 17-29.

²²⁷ Clar, E., Martín-Retortillo, M., & Pinilla, V. (2018). The Spanish path of agrarian change, 1950–2005: From authoritarian to export-oriented productivism. *Journal of Agrarian Change*, 18(2), 324-347.

²²⁸ Littletree, S. D. (2018). "Let Me Tell You about Indian Libraries": Self-Determination, Leadership, and Vision—The Basis of Tribal Library Development in the United States (PhD dissertation). University of Washington.

9. Berfungsi sebagai pusat penelitian bagi anggota suku dan non-suku milik rakyat (ALA (American Library Association). (2018b). hal 4)²²⁹

Layanan perpustakaan juga dapat menjadi wadah advokasi bagi masyarakat adat, seperti yang dilakukan oleh AMAN dalam memperjuangkan hak-hak mereka (Blackburn, 2017). Menyediakan akses ke sumber daya hukum dan informasi tentang hak-hak adat dapat membantu melindungi tanah, sumber daya, dan budaya mereka dari ancaman eksploitasi.²³⁰

Kolaborasi lintas sektor, seperti yang dijalankan oleh Mahdi (2020), menjadi kunci untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat adat. Kemitraan dengan pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, dan penyedia layanan kesehatan akan menghasilkan program yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.²³¹

Belajar dari pengalaman global, seperti rencana aksi rekonsiliasi di Australia (Arizona et al. , 2019)²³² dan Pembelajaran dari tantangan yang dihadapi perpustakaan suku di Amerika Serikat (ATALM, 2014a) dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan layanan perpustakaan untuk masyarakat adat.²³³ Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan pendanaan, di mana perpustakaan suku menerima dana yang jauh lebih sedikit dibandingkan perpustakaan umum. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai bagi perpustakaan yang melayani masyarakat adat, mengingat peran penting mereka dalam melestarikan budaya dan pengetahuan lokal.

Selain itu, perpustakaan suku di Amerika Serikat sering kali terletak di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap pelatihan dan sumber daya, termasuk akses internet. Tantangan ini menyoroti pentingnya mengembangkan model layanan perpustakaan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan infrastruktur di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital yang tepat guna, seperti perpustakaan keliling atau platform daring yang mudah diakses, dapat menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat adat di daerah terpencil.

²²⁹ ALA (American Library Association). "Number Employed in Libraries: Fact Sheet 2." Chicago: American Library Association. www.ala.org/tools/libfactsheets/alalibraryfactsheet02.

²³⁰ Blackburn, F. (2017). Community engagement, cultural competence and two Australian public libraries and Indigenous communities. *IFLA journal*, 43(3), 288-301.

²³¹ Mahdi, R. (2020). Strengthening community economy inclusively through literacy for prosperity. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(2), 160-176.

²³² Arizona, Y., Wicaksono, M. T., & Vel, J. (2019). The role of indigeneity NGOs in the legal recognition of adat communities and customary forests in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 487-506.

²³³ ATALM (Association of Tribal Archives, Libraries, and Museums). (2014a). The Disconnect between the FCC's Schools and Libraries Universal Service Program (E-Rate) and Tribal Libraries.

Karakteristik unik perpustakaan suku, seperti koleksi yang mencakup bahan-bahan suci dan staf yang berperan sebagai "penjaga budaya," juga perlu dipertimbangkan dalam konteks Indonesia. Perpustakaan di Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik perpustakaan suku di Amerika Serikat dalam mengelola dan merawat koleksi budaya yang sensitif, serta memberdayakan staf lokal sebagai sumber pengetahuan dan kearifan lokal.

Dengan mengadaptasi dan berinovasi berdasarkan pengalaman perpustakaan suku di Amerika Serikat, Indonesia dapat memperkuat layanan perpustakaan untuk masyarakat adat, memastikan akses yang setara terhadap informasi, serta melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya bangsa.

Dengan visi jangka panjang dan komitmen yang kuat, perpustakaan dapat menjadi lebih dari sekadar tempat menyimpan buku. Perpustakaan adalah pusat pemberdayaan, pelestarian budaya, dan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat dan terpencil di Indonesia. Melalui layanan yang inklusif dan responsif, perpustakaan tidak hanya memperkaya kehidupan masyarakat adat, tetapi juga memperkuat keragaman budaya bangsa

5.2.5 Literasi Kesehatan, Krisis Opioid, Dan Pandemi

. Kebutuhan akan informasi kesehatan yang dapat dipercaya semakin meningkat seiring dengan kompleksitas sistem perawatan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Perpustakaan umum memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan akses terhadap informasi kesehatan yang relevan dan otoritatif, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, serta memfasilitasi pemahaman informasi kesehatan. Hal ini menjadi krusial terutama di tengah krisis kesehatan masyarakat seperti pandemi Covid-19 yang membutuhkan informasi cepat dan akurat.

Menurut Goldsmith (2019), perpustakaan umum berkontribusi dalam meningkatkan literasi kesehatan dengan menyediakan:

- a. Akses terhadap informasi kesehatan dan kebugaran yang relevan dan otoritatif.
- b. Peningkatan literasi kesehatan dan bantuan dalam memahami informasi kesehatan yang kompleks.
- c. Bantuan dalam memahami undang-undang dan peraturan terkait kesehatan.
- d. Program kesehatan dan kebugaran.
- e. Penyebaran informasi, rujukan, dan kemitraan dalam pemberian layanan kesehatan. (hal. 3)²³⁴

Perpustakaan umum memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat seperti krisis opioid dan pandemi Covid-19 dengan menyediakan informasi kesehatan yang dapat diandalkan, meningkatkan literasi kesehatan, dan memfasilitasi akses terhadap sumber daya kesehatan (Jay et al. ,

²³⁴ Goldsmith, F. (2019). Healthier communities: Libraries improve health literacy, access. *Am Libr Assoc*, 6, 1-18.

2022)²³⁵. Dalam konteks krisis opioid, perpustakaan umum secara aktif berkontribusi untuk memerangi penyalahgunaan opioid melalui pendidikan, pelatihan, intervensi, dan kemitraan dengan berbagai organisasi (Compton & Jones, 2019)²³⁶. Mereka menyediakan layanan penting seperti mendidik masyarakat tentang penggunaan dan penyalahgunaan opioid, menawarkan sesi pelatihan, opsi pembuangan yang aman untuk resep yang tidak terpakai, dan memelihara sumber daya seperti Narcan untuk situasi overdosis (Compton & Jones, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan umum memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengatasi krisis opioid dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya yang relevan, meningkatkan kesadaran publik, mengurangi stigma, dan membina kemitraan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik (Compton & Jones, 2019).

Di tengah pandemi Covid-19, perpustakaan umum telah meningkatkan peran mereka untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang Covid-19, membantu masyarakat memahami protokol kesehatan dan vaksinasi, menawarkan akses ke layanan kesehatan virtual, dan mendukung upaya pemulihan masyarakat pasca pandemi. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan responsivitas perpustakaan umum dalam mengatasi krisis kesehatan yang muncul dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan berfungsi sebagai pusat informasi dan fasilitator literasi kesehatan, perpustakaan umum telah menjadi pilar penting dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat selama masa krisis.

Krisis opioid, yang ditandai dengan penyalahgunaan dan kecanduan opioid, telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak dengan konsekuensi parah pada individu dan masyarakat (Coussens et al. , 2019).²³⁷ Krisis ini dipicu oleh berbagai faktor termasuk resep yang berlebihan, informasi yang salah, dan kurangnya akses ke manajemen nyeri yang memadai (Coussens et al. , 2019). Upaya untuk mengatasi krisis opioid telah melibatkan berbagai intervensi seperti program akses nalokson, kampanye kesehatan masyarakat, dan perubahan kebijakan yang bertujuan untuk membatasi penyalahgunaan opioid dan mengurangi kematian akibat overdosis (Fudin et al. , 2019)²³⁸. Perpustakaan umum secara aktif terlibat dalam upaya ini dengan menyediakan sumber daya, informasi, dan

²³⁵ Jay, J., Chan, A., Gayed, G., & Patterson, J. (2022). Coverage of the opioid crisis in national network television news from 2000–2020: A content analysis. *Substance Abuse*, 43(1), 1322-1332.

²³⁶ Compton, W. M., & Jones, C. M. (2019). Epidemiology of the US opioid crisis: the importance of the vector. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1451(1), 130-143.

²³⁷ Coussens, N. P., Sittampalam, G. S., Jonson, S. G., Hall, M. D., Gorby, H. E., Tamiz, A. P., .. & Rasmussen, K. (2019). The opioid crisis and the future of addiction and pain therapeutics. *Journal of pharmacology and experimental therapeutics*, 371(2), 396-408.

²³⁸ Fudin, J., Persico, A. L., Bettinger, J. J., & Wegrzyn, E. L. (2019). The state of naloxone: access amid a public health crisis. *Medicine Access@ Point of Care*, 3, 2399202619847639.

dukungan kepada individu yang terkena gangguan penggunaan opioid (Fudin et al. , 2019).

Studi telah menunjukkan bahwa perpustakaan umum telah menjadi tempat di mana individu dapat menggunakan obat-obatan terlarang dan mengalami overdosis, menyoroti perlunya perpustakaan dilengkapi dengan sumber daya seperti nalokson untuk merespons secara efektif keadaan darurat tersebut (Lowenstein et al. , 2021)²³⁹. Pergeseran peran perpustakaan umum dari pusat informasi tradisional menjadi ruang yang terlibat dalam pengurangan bahaya mencerminkan sifat tantangan kesehatan masyarakat yang terus berkembang dan pentingnya lembaga masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Dengan merangkul peran mereka dalam respons krisis dan pengurangan bahaya, perpustakaan umum menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung kesejahteraan semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang terkena gangguan penggunaan zat (Lowenstein et al. , 2021).

Dalam konteks krisis opioid, perpustakaan umum juga berperan penting dalam mengurangi stigma terkait penggunaan narkoba, meningkatkan akses ke sumber daya pengurangan dampak buruk, dan membina kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi individu yang berjuang dengan gangguan penggunaan zat (Compton & Jones, 2019).²⁴⁰ Upaya kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan dampak perpustakaan umum dalam mengatasi krisis opioid tetapi juga berkontribusi pada pembangunan respons masyarakat yang lebih tangguh dan penuh kasih sayang terhadap masalah kesehatan masyarakat yang kompleks ini (Compton & Jones, 2019)

5.2.6 Keterlibatan Masyarakat

Selama beberapa dekade terakhir, perpustakaan umum telah berfokus pada pemenuhan kebutuhan informasi dan membaca individu. Namun, dengan dominasi mesin pencari seperti Google, profesional perpustakaan menyadari perlunya adaptasi peran mereka di era digital. Selain itu, meningkatnya kekhawatiran tentang penurunan keterlibatan masyarakat dan kepercayaan pada pemerintah mendorong perpustakaan untuk berperan lebih aktif dalam mempromosikan persatuan dan wacana demokratis (Kranich, 2012)²⁴¹.

Nancy Kranich (2017) menyarankan agar perpustakaan mengubah fokusnya dari sekadar "berfokus pada koleksi" menjadi lebih "berpusat pada keterlibatan", dan mengalihkan misi mereka dari sekadar memberikan informasi menjadi melibatkan pengguna mereka. Potensi perpustakaan umum dalam menjalankan fungsi

²³⁹ Lowenstein, M., Feuerstein-Simon, R., Shen, R., Dupuis, R., Kinsey, E. W., Luna Marti, X., & Cannuscio, C. (2021). Public libraries as partners in confronting the overdose crisis: A qualitative analysis. *Substance Abuse*, 42(3), 302-309.

²⁴⁰ Compton, W. M., & Jones, C. M. (2019). Epidemiology of the US opioid crisis: the importance of the vector. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1451(1), 130-143.

²⁴¹ Kranich, N. (2012). Libraries and civic engagement. *Library and book trade almanac*, 2012, 75-96.

demokrasi ini sangat besar. Kranich menekankan bahwa jika perpustakaan ingin mendorong demokrasi yang kuat, mereka harus melampaui proses transaksional tradisional yang hanya menyediakan akses informasi (demokrasi tipis), dan beralih ke interaksi yang lebih relasional di mana mereka memberikan kesempatan untuk pembelajaran informal dan ruang bagi warga untuk terlibat dalam kehidupan sipil komunitas mereka (demokrasi yang kuat).²⁴²

Dalam era berita palsu dan politik yang memecah belah, perpustakaan memiliki peran penting dalam menjembatani perpecahan dalam komunitas dengan memberikan suara kepada orang-orang dan menciptakan kesempatan untuk mendengarkan satu sama lain (Kranich 2017; Budd 2019). Untuk mencapai hal ini, pengelola perpustakaan umum dapat melakukan lima hal penting:

- a. Pendidikan Kewarganegaraan: Meningkatkan kesadaran akan kewarganegaraan, keterlibatan sipil, dan tanggung jawab kewarganegaraan di dalam komunitas.
- b. Pemula Percakapan: Mengidentifikasi isu-isu komunitas yang menantang, menciptakan forum untuk berbagi pendapat, dan mengembangkan strategi tindakan.
- c. Sebagai Jembatan Komunitas: Menyatukan orang-orang dari beragam latar belakang, termasuk pejabat pemerintah daerah dan organisasi dengan perspektif yang berbeda, untuk membangun komunitas yang lebih kuat.
- d. Visi yang Visioner: Memimpin upaya untuk mengembangkan visi komunitas yang luas dan inklusif.
- e. Forum Masyarakat: Menjadi tempat di mana demokrasi, keterlibatan masyarakat, dan wacana publik terjadi melalui berjalan, berbicara, berpikir, dan bertindak bersama. Untuk mencapai tujuan ini, perpustakaan perlu melampaui batas gedung, mengidentifikasi pemimpin kunci dari berbagai segmen masyarakat, menyumbangkan keahlian dan sumber daya perpustakaan dalam proses keterlibatan, menjadikan gedung perpustakaan sebagai pusat kegiatan keterlibatan, menciptakan budaya keterlibatan di kalangan staf, dan mengembangkan kegiatan dan program yang memperkuat partisipasi masyarakat (Dewan Perpustakaan Perkotaan 2011). Rebecca Hill (2018) juga menyarankan agar program-program ini mencakup promosi keterlibatan sipil di kalangan generasi muda maupun orang dewasa.²⁴³

John Budd (2007) menekankan bahwa dalam konteks misi demokrasi, perpustakaan umum memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan masyarakat dengan sumber daya yang mendukung diskusi demokratis, termasuk ide-ide yang melandasi dasar demokrasi serta pernyataan, klaim, dan diskusi

²⁴² Kranich, N. (2017). Mind the gap: connecting academic libraries and campus communities. *The NEA Almanac of Higher Education, 2017*, 47-59.

²⁴³ Hill, Rebecca. "Civic Engagement and Political Discourse in the Library." *VOYA* 41 (2018): 32-34.

kontemporer tentang isu-isu yang muncul dalam masyarakat yang demokratis²⁴⁴. Dalam hal ini, perpustakaan umum berperan sebagai aparat musyawarah demokratis, tempat di mana warga dapat memperoleh informasi yang beragam, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan terlibat dalam diskusi terinformasi tentang isu-isu penting. Dengan memberikan akses ke sumber daya ini, perpustakaan umum membantu memupuk partisipasi dan pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan dalam masyarakat yang demokratis.

Pentingnya keterlibatan masyarakat juga memberikan penekanan baru pada perpustakaan sebagai ruang sosial dan fisik yang berfungsi sebagai perekat yang menyatukan alam semesta perpustakaan, meskipun akses digital jarak jauh ke informasi tetap penting (Barclay, 2017). Konsep ini mengakui bahwa ruang fisik perpustakaan memiliki peran yang saling melengkapi dan kritis dalam menghubungkan orang-orang, mempromosikan interaksi manusia, dan membangun identitas sipil. Perpustakaan menjadi ruang komunal yang membantu individu terlibat satu sama lain, memahami komunitas mereka, serta menghadapi tantangan yang dihadapinya (Söderholm & Nolin, 2015).

Perpustakaan bukan hanya tempat pasif untuk mendapatkan informasi, tetapi juga ruang aman yang dirancang untuk mendorong individu berbicara dengan bebas dan jujur. Banyak perpustakaan menyelenggarakan pelatihan untuk fasilitator yang dapat mempromosikan diskusi terbuka dan konstruktif di masyarakat (Dixon, 2017)²⁴⁵. Mereka juga berperan dalam melawan kebohongan, meningkatkan literasi kritis individu, membela kebebasan intelektual, dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh warga setempat (Bossaler, 2018).

Selain itu, perpustakaan dapat memajukan inisiatif teknologi sipil untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat. Teknologi sipil mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan cara warga, bisnis, dan kelompok lain terlibat dan berinteraksi dengan pemerintah (Ayre & Craner, 2017)²⁴⁶. Contohnya adalah aplikasi seluler yang memungkinkan warga melaporkan masalah dengan layanan kota, mencari informasi tentang transportasi umum, atau menggunakan katalog perpustakaan. Perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat teknologi sipil, tempat para pengembang dan pengelola teknologi sipil dapat bertemu. Selain itu, perpustakaan dapat menyediakan portal terbuka untuk data yang dihasilkan kota, termasuk data pemerintah federal dan negara bagian, yang dapat digunakan oleh bisnis lokal dan membuka peluang interaksi antara pemerintah dan warganya (Ayre

²⁴⁴ Budd, J. M. (2003). The library, praxis, and symbolic power. *The library quarterly*, 73(1), 19-32.

²⁴⁵ Dixon, J. A. (2017). Convening Community Conversations. *Library Journal*, 142(October 15), 41-44.

²⁴⁶ Ayre, L. B., & Craner, J. (2017). Technology column: public libraries as civic technology hubs. *Public Library Quarterly*, 36(4), 367-374.

& Craner,2017)²⁴⁷. Dengan melibatkan masyarakat dan memanfaatkan teknologi sipil, perpustakaan memainkan peran penting dalam membangun hubungan antara individu, komunitas, dan pemerintah, serta mempromosikan partisipasi aktif dalam kehidupan publik dan demokrasi.

Keterlibatan perpustakaan dalam kegiatan keterlibatan masyarakat dapat menimbulkan kekhawatiran tentang netralitas politik perpustakaan. Walaupun perpustakaan berperan dalam memfasilitasi diskusi, dialog, dan keterlibatan warga, tetap penting bagi perpustakaan untuk mempertahankan citra sebagai lembaga yang netral secara politik (Hill, 2018).²⁴⁸

5.2.7 Menjangkau Organisasi Masyarakat Lainnya Dengan Perpustakaan

Perpustakaan, sebagai pusat informasi dan pembelajaran, memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan informasi dan menghubungkan masyarakat dengan berbagai organisasi. Dalam konteks pandemi, perpustakaan dapat menjadi pusat informasi terpercaya mengenai penyakit-penyakit yang sedang berjangkit, misalnya COVID-19 yang menggemparkan seluruh dunia, menyediakan akses ke sumber daya kesehatan yang kredibel, dan melawan misinformasi (Ewen, 2020a).²⁴⁹

Selain itu, perpustakaan dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat, seperti lembaga layanan sosial, fasilitas kesehatan, dan organisasi nirlaba, untuk menyediakan layanan yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Misalnya, perpustakaan dapat bekerja sama dengan organisasi kesehatan untuk menyelenggarakan program vaksinasi atau penyuluhan kesehatan.

Pandemi telah mempercepat transformasi digital perpustakaan. Layanan virtual seperti referensi online, jam cerita daring, dan program pembelajaran jarak jauh telah menjadi semakin penting (Pambayun, 2021)²⁵⁰. Perpustakaan juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi, mempromosikan layanan, dan berinteraksi dengan masyarakat (Rachman & Marijan, 2021).²⁵¹

Selain itu, perpustakaan dapat mengembangkan platform digital seperti situs web dan aplikasi seluler untuk menyediakan akses ke koleksi digital, informasi komunitas, dan layanan lainnya. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjangkau

²⁴⁷ Ayre, L. B., & Craner, J. (2017). Technology column: public libraries as civic technology hubs. *Public Library Quarterly*, 36(4), 367-374.

²⁴⁸ Hill, R. (2018). Civic Engagement and Political Discourse in the Library. *VOYA*, 41, 32-34.

²⁴⁹ ALA (American Library Association). (2020a). Pandemic Preparedness.

²⁵⁰ Pambayun, K. G. (2021). Digital libraries during Covid-19 pandemic: a bibliometric analysis and information mapping. *Indonesian Journal of Librarianship*, 17-30.

²⁵¹ Rachman, R. F., & Marijan, K. (2021). Kebijakan Pemanfaatan Media Sosial Dinas Perpustakaan & Kearsipan Surabaya. *Inovasi*, 18(1), 103-111.

masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak dapat mengunjungi perpustakaan secara fisik.

Perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat dan mendorong inklusi sosial. Program-program literasi, seperti revitalisasi perpustakaan desa (Asmoro & Sari, 2020)²⁵² dan layanan pengiriman buku (Pamungkas, 2022), dapat meningkatkan aksesibilitas dan pengetahuan masyarakat.
253

Perpustakaan juga dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan digital atau kewirausahaan. Dengan demikian, perpustakaan dapat memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pandemi COVID-19 telah menyoroiti tantangan yang dihadapi perpustakaan, seperti kesenjangan digital dan keterbatasan anggaran. Namun, pandemi juga telah membuka peluang baru untuk inovasi dan kolaborasi.

Perpustakaan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan menjalin kemitraan yang kuat dengan organisasi masyarakat lainnya, perpustakaan dapat memperluas jangkauan mereka, meningkatkan dampak sosial mereka, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya

5.2.8 Layanan Untuk Anak-Anak Dan Remaja: Transformasi Peran Perpustakaan Di Era Digital

Layanan perpustakaan untuk anak-anak dan remaja telah mengalami transformasi signifikan di era digital. Perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga lingkungan belajar informal yang mendukung pembelajaran di berbagai domain, baik di dalam maupun di luar gedung perpustakaan (Campana dan Mills, 2019). Perpustakaan kini berperan sebagai pusat komunitas yang inklusif, menyediakan akses ke berbagai sumber daya informasi dan teknologi, serta memfasilitasi pembelajaran aktif dan kolaboratif.

5. 2. 8. 1. Pembelajaran Terhubung Dan Pemberdayaan Remaja

Remaja merupakan kelompok pengguna perpustakaan yang signifikan. Perpustakaan dapat mendukung perkembangan literasi mereka yang beragam, membantu mereka berpikir kritis, dan menggunakan sumber daya digital secara

²⁵² Asmoro, B. T., & Sari, D. K. (2020). Meningkatkan Literasi Siswa Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Melalui Revitalisasi Perpustakaan Desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 280-288.

²⁵³ Pamungkas, A. H. (2022). Inovasi Layanan “Delivery Service” Pada Perpustakaan Sekolah di Era Pandemi Covid-19. *Tibannbaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 6(2), 160.

efektif (Braun et al. , 2013). Perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi buku dan jurnal yang relevan dengan minat remaja, tetapi juga menawarkan akses ke berbagai sumber daya online, seperti basis data, artikel ilmiah, dan platform pembelajaran digital.

Konsep "pembelajaran terhubung" menjadi semakin relevan di era digital. Remaja belajar paling baik ketika pembelajaran terkait dengan minat dan keinginan mereka (YALSA, 2014). Perpustakaan dapat memfasilitasi pembelajaran terhubung dengan menyediakan lingkungan belajar informal yang disesuaikan dengan minat remaja, seperti ruang belajar kolaboratif, studio kreatif, dan laboratorium komputer. Selain itu, perpustakaan dapat menawarkan program-program yang relevan dengan kebutuhan remaja, seperti pelatihan keterampilan digital, lokakarya kewirausahaan, dan diskusi kelompok tentang isu-isu sosial.

5.2.8.2. Inovasi Teknologi Digital Dalam Layanan Perpustakaan

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi perpustakaan untuk meningkatkan layanan mereka bagi anak-anak dan remaja. Beberapa inovasi teknologi yang dapat diterapkan antara lain:

. Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi perpustakaan untuk meningkatkan layanan mereka bagi anak-anak dan remaja. Beberapa inovasi teknologi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Aplikasi Mobile: Aplikasi seperti Libby atau OverDrive dapat menyediakan akses mudah ke katalog perpustakaan, informasi acara, dan sumber daya digital lainnya, serta memungkinkan pengguna untuk memesan buku, memperpanjang pinjaman, dan memberikan umpan balik secara online.
2. Platform Pembelajaran Online: Platform seperti Coursera, Udemy, atau Khan Academy dapat menawarkan kursus online, tutorial, dan sumber belajar interaktif yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta memungkinkan pengguna untuk belajar secara mandiri atau berkolaborasi dengan teman sebaya.
3. Koleksi Digital Interaktif: Perpustakaan dapat berlangganan layanan seperti TumbleBooks atau Epic! yang menyediakan buku elektronik, buku audio, video, dan permainan edukatif yang menarik dan dapat diakses secara digital. Ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi konten secara interaktif dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih mendalam.
4. Ruang Kreatif Digital: Perpustakaan dapat menyediakan ruang dan peralatan seperti Makerspaces yang dilengkapi dengan perangkat lunak desain grafis (misalnya, Adobe Photoshop atau Illustrator), perangkat lunak animasi (misalnya, Blender atau Maya), dan perangkat lunak pembuatan musik (misalnya, GarageBand atau Ableton Live) untuk kegiatan kreatif berbasis teknologi, seperti pembuatan film, animasi, desain grafis, dan musik. Ruang ini dapat memfasilitasi kolaborasi dan eksperimen kreatif di kalangan anak-anak dan remaja.

5. Media Sosial: Perpustakaan dapat memanfaatkan platform media sosial populer seperti Instagram, TikTok, atau Facebook untuk berinteraksi dengan anak-anak dan remaja. Melalui konten yang menarik dan relevan, perpustakaan dapat mempromosikan program, membangun komunitas online, serta mendapatkan umpan balik dan saran dari pengguna.

5.2.8.3 Pendekatan Berpusat Pada Remaja

Bernier (2020) mengkritik model layanan pemuda tradisional, yang disebutnya Youth Development Industrial Complex (YDIC), yang memandang remaja sebagai individu yang bermasalah dan perlu dipersiapkan untuk menjadi dewasa. Pendekatan ini seringkali menghasilkan layanan yang berfokus pada karier, berbasis keterampilan, dan ditanamkan dengan nilai-nilai kelas menengah.²⁵⁴

Sebagai alternatif, Bernier (2020) dan Agosto (2020) mengusulkan pendekatan "berpusat pada remaja" yang mengakui keragaman, suara, dan minat remaja.²⁵⁵ Pendekatan ini menempatkan remaja sebagai ahli dalam menentukan kebutuhan dan preferensi mereka sendiri, serta mengakui keragaman dan marginalisasi yang mereka alami (Kumasi, 2020). Pendekatan "berpusat pada remaja" ini mendorong perpustakaan untuk merangkul keragaman remaja dan memberdayakan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait layanan perpustakaan. Dengan melibatkan remaja secara aktif, perpustakaan dapat menciptakan ruang yang lebih inklusif dan relevan bagi mereka. Gambar 7 berikut ini memberikan ilustrasi mengenai konsep ulang layanan perpustakaan yang berpusat pada remaja:

Gambar 7 Konsep ulang layanan perpustakaan untuk dan dengan remaja

²⁵⁴ Bernier, A. (Ed.). (2013). *Transforming young adult services*. American Library Association.

²⁵⁵ Agosto, D. E. (2016). What's next in US public library services for teens? A peek into a promising future. *Public Library Quarterly*, 35(4), 344-350.



YALSA (2014) telah “mendesain ulang” layanan perpustakaan untuk remaja dari sudut pandang enam kategori: kepemimpinan, pembelajaran, komunitas, kreativitas, kewarganegaraan digital, dan literasi. Grafik asosiasi (gambar 7 di atas) menggambarkan tugas-tugas menantang yang dihadapi pustakawan remaja dan luasnya peran yang dapat dimainkan pustakawan.

5.2.8.4 Perlunya Membangkitkan Dan Mempopularitaskan Novel Grafis

Penggunaan istilah "novel grafis" dalam dunia sastra visual memicu diskursus mengenai validitas dan relevansinya. Meskipun istilah ini telah diadopsi secara luas, terdapat ambiguitas dalam mendefinisikan batasan yang jelas antara "novel grafis" dan "komik". Secara naratif, keduanya memiliki kesamaan mendasar dalam menyampaikan cerita melalui kombinasi teks dan gambar.

Meskipun para pengarang komik cenderung tidak membedakan secara tegas antara kedua istilah tersebut, penggunaan "novel grafis" mengindikasikan adanya upaya untuk memberikan konotasi yang berbeda pada karya tertentu. Novel grafis seringkali diasosiasikan dengan karya yang lebih kompleks, matang, dan memiliki nilai sastra yang lebih tinggi dibandingkan komik konvensional.

Namun, perlu dicatat bahwa eksperimentasi bentuk dan format bukanlah ciri eksklusif dari novel grafis. Komik juga dapat menjadi medium untuk eksplorasi artistik dan naratif yang inovatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemisahan antara kedua istilah tersebut tidak selalu didasarkan pada perbedaan substansial dalam pendekatan kreatif. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah istilah "novel grafis" masih relevan dan diperlukan dalam konteks saat ini? Apakah istilah ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengapresiasi karya sastra visual, atau justru menciptakan dikotomi yang tidak perlu?

Diskusi lebih lanjut mengenai hal ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang dinamika dan evolusi dalam dunia sastra visual.

Istilah "novel grafis" secara literal memiliki definisi yang ambigu, terlihat dari makna leksikalnya yang merujuk pada "buku komik berformat panjang" atau "buku komik setebal buku yang ditujukan untuk dibaca sebagai sebuah cerita". Namun, pemahaman istilah ini tidak dapat dilepaskan dari konteks historisnya. "Novel grafis" merupakan istilah yang diciptakan di dunia komik Barat, khususnya Amerika Serikat, dan kemudian menyebar ke belahan dunia lain. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk membedakan antara komik yang disebut "novel grafis" dengan komik biasa, meskipun batasan antara keduanya seringkali kabur. (Hadid, M. (2012)²⁵⁶

Meskipun sebagian besar inovasi dalam penerbitan didominasi oleh perkembangan digital, popularitas novel grafis menjadi pengecualian yang menarik. Istilah "novel grafis" secara leksikal merujuk pada "buku komik berformat panjang" atau "buku komik setebal buku yang dimaksudkan untuk dibaca sebagai sebuah cerita". DeCandido (1990) mendefinisikan novel grafis sebagai "cerita mandiri yang menggunakan kombinasi teks dan seni untuk mengartikulasikan plot, dengan isi yang setara dengan cerita pendek panjang atau novel pendek (hal. 50)". Definisi ini menyoroti bahwa novel grafis tidak hanya sekadar komik panjang, tetapi juga memiliki kedalaman narasi dan kompleksitas plot yang sebanding dengan karya sastra lainnya.

Istilah "novel grafis" pertama kali diciptakan pada November 1964 oleh Richard Kyle untuk merujuk pada narasi komik yang panjang. Istilah ini kemudian diadaptasi dan digunakan oleh Bill Spicer dalam Majalah *Graphic Story*-nya. Meskipun demikian, Harvey (dalam Williams & Lyons, 2010) berpendapat bahwa contoh pertama komik yang secara eksplisit memasarkan dirinya sebagai "novel grafis" adalah "Beyond Time and Again" karya George Metzger yang terbit pada tahun 1976, di mana istilah tersebut ditampilkan pada halaman judul dan sampul jaket debu. (Williams, P., & Lyons, J. (Eds.). (2010, h. Xiv)²⁵⁷.

²⁵⁶ Hadid, M. (2012). Novel Grafis: Studi Awal Tentang Istilah dan Bentuk. *Ars: Jurnal Seni Rupa dan Desain*, 1(16).

²⁵⁷ Williams, P., & Lyons, J. (Eds.). (2010). *The rise of the American comics artist: creators and contexts*. Univ. Press of Mississippi.

Meskipun berakar dari komik dan buku komik, novel grafis memiliki ciri khas yang membedakannya, seperti tema yang lebih serius, pengembangan cerita yang lebih luas, serta kompleksitas visual dan tekstur (Chute, 2012).²⁵⁸ Novel grafis ditujukan untuk berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan mencakup beragam genre, baik fiksi maupun nonfiksi (Hatfield, 2005)²⁵⁹. Salah satu tonggak penting dalam pengakuan novel grafis sebagai karya sastra adalah penghargaan Pulitzer yang diberikan kepada "Maus: A Survivor's Tale" karya Art Spiegelman pada tahun 1992 (Grimwood, M. (2007)²⁶⁰

Novel grafis, sebagai bentuk seni yang menggabungkan narasi dan visual, telah menghadapi kritik terkait potensi dampak negatifnya, seperti kenakalan remaja, serta konten yang mengandung kekerasan, seksualitas eksplisit, dan seksisme (Schwarz, 2002)²⁶¹. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai kualitas fisik beberapa novel grafis dalam koleksi perpustakaan. [1]

Namun, di sisi lain, novel grafis juga diakui sebagai kontribusi sastra yang signifikan, terutama dalam mendorong minat baca dan pemikiran kritis di kalangan anak muda. Novel grafis terbukti efektif dalam menarik minat baca remaja laki-laki, yang seringkali enggan membaca (Schwarz, 2002). Selain itu, novel grafis juga berfungsi sebagai sarana bagi pembaca baru untuk melatih keterampilan membaca, memperkaya kosakata, dan memahami pengembangan plot (Duncan & Smith, 2009).²⁶²

Sejarah novel grafis di Indonesia berakar panjang, bahkan dapat ditelusuri hingga peninggalan budaya seperti candi dan cerita wayang. Relief-relief di Candi Borobudur, yang terdiri dari 1460 adegan berurutan, dapat dianggap sebagai cikal bakal komik di Indonesia. Setiap adegan menggambarkan kronologi kisah masa lalu, mirip dengan prinsip dasar komik modern. Selain itu, wayang beber, yang merupakan cerita wayang digambarkan di atas kertas atau kain, juga menunjukkan kemiripan dengan komik. Wayang beber menggunakan gambar-gambar yang dipanel dan disusun berurutan untuk menyampaikan informasi (Maharsi, 2011:39)²⁶³.

Persamaan antara relief candi, lukisan wayang, dan komik terletak pada penggunaan media visual sebagai sumber informasi, meskipun tanpa teks.

²⁵⁸ Chute, H. (2012). Graphic narrative. In *The Routledge Companion to Experimental Literature* (hlm.407-419). Routledge.

²⁵⁹ Hatfield, C. (2009). *Alternative comics: An emerging literature*. Univ. Press of Mississippi.

²⁶⁰ Grimwood, M. (2007). The graphic memoir: Art Spiegelman's *Maus: A survivor's tale*. In *Holocaust Literature of the Second Generation* (hlm.63-81). New York: Palgrave Macmillan US.

²⁶¹ Schwarz, G. E. (2002). Graphic novels for multiple literacies. *Journal of adolescent & adult literacy*, 46(3), 262-265.

²⁶² Duncan, R., & Smith, M. J. (2009). *The power of comics: History, form and culture*. A&C Black.

²⁶³ Maharsi, I. (2011). *Komik, Dunia Kreatif Tanpa Batas*. Yogyakarta: Kata Buku

Perbedaan utama terletak pada media yang digunakan, di mana candi menggunakan batu pahatan, wayang beber menggunakan kertas atau daun kering, sedangkan komik modern menggunakan kertas cetak.

Pengaruh Barat dan Tiongkok mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1931-1954 melalui surat kabar. Komik-komik seperti *Flippie Flink* karya Clinge Doorebos dan *Flash Gordon* mulai muncul di surat kabar berbahasa Belanda seperti *De Java Bode* dan *De Orient* (Bonnet, 1998:19).²⁶⁴

Setelah Kemerdekaan Indonesia, masyarakat mulai banyak mengenal tokoh-tokoh komik strip populer dari Amerika seperti *Rip Kirby* (Alex Raymond), *Phantom* (Wilson Mc Coy), *Jonny Hazard* (Frank Robbins), dan lainnya. Komik strip mingguan tersebut kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang merupakan komik buku pertama di Indonesia yang diterbitkan oleh Gapura dan Keng Po di Jakarta serta Perfectas di Malang.²⁶⁵

Menariknya, meskipun remaja sangat antusias, novel grafis tetap populer di kalangan dewasa muda berusia 20-an juga, mungkin karena tema-tema canggih di banyak dari mereka (DeCandido, 1990; Pinkley dan Casey, 2013). Ada juga pasokan novel grafis untuk anak-anak yang terus meningkat. ALA menyediakan daftar “Novel Grafis Terbaik untuk Anak” untuk memberikan layanan konsultasi pembaca bagi orang tua dan pustakawan di daerah ini (ALA 2014b). Meskipun novel grafis dapat dilihat sebagai peluang untuk memikat remaja ke sastra lain, untuk menarik pembaca yang enggan, dan untuk meningkatkan sirkulasi remaja, novel grafis sangat berharga, memberikan pengalaman imajinatif dan pendidikan bagi remaja (Serantes, 2020). Mereka telah menjadi bagian penting dari koleksi remaja.

5.2.8.5 Isu Kebebasan Intelektual Yang Mempengaruhi Anak-Anak Dan Remaja

Masalah sensor dan kebebasan intelektual seringkali menjadi hal yang terdepan dalam layanan perpustakaan untuk anak-anak dan dewasa muda. Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Internet Anak, pustakawan anak-anak dan anak muda menghadapi tantangan baru untuk mematuhi undang-undang dan tetap melindungi hak akses informasi kaum muda (baca bagian “Perpustakaan Sekolah”). Dalam hal kebebasan intelektual, perpustakaan umum berbeda secara mendasar dari perpustakaan sekolah setidaknya dalam dua hal penting. Pertama, perpustakaan sekolah jarang memiliki materi dewasa, kecuali untuk guru. Kedua, tidak seperti sekolah, perpustakaan umum tidak melayani di tempat orang tua—yaitu menggantikan orang tua—walaupun beberapa orang tua dan kelompok politik menginginkan perpustakaan bertindak sebagai pemantau dan penyensor. Mengingat kebijakan ALA tentang akses terbuka tentu saja tidak bisa semena-mena diadopsi oleh sekolah karena ada aspek agama, budaya, dan etika yang harus dijaga untuk pertumbuhan dan perkembangan moral siswa.

²⁶⁴ Bonnet, M. (1998). Komik Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Populer Gramedia

²⁶⁵ Soedarso, N. (2015). Komik: karya sastra bergambar. *Humaniora*, 6(4), 496-506.

Terdapat banyak diskusi di antara para profesional ilmu perpustakaan dan informasi mengenai paparan anak-anak terhadap kekerasan grafis dan seksualitas melalui internet dan perangkat seluler (Jaeger, Bertot, & Gorham, 2015).²⁶⁶

Masalah kebebasan intelektual baru-baru ini untuk beberapa perpustakaan adalah *Drag Queen Story Hour* yang kontroversial. *Drag Queen Story Hour* adalah nama dari sebuah kelompok nirlaba yang menyediakan pendongeng yang berpakaian “nyentrik” dan menyampaikan program kepada anak-anak di berbagai tempat termasuk jam cerita di perpustakaan umum.

Ide model ini bisa dikemas oleh perpustakaan umum, misalnya mengundang pendongeng dengan menggunakan pakaian daerah yang sopan, lalu menyampaikan cerita dongeng buat anak-anak, sehingga ini bisa menjadi daya tarik tersendiri buat anak-anak yang bisa saja tertarik karena kostum pendongeng dan bisa juga karena cerita yang ditampilkan pendongeng.

Ini hanyalah salah satu contoh dari ketegangan sosial, politik, dan hukum yang sedang berlangsung yang dihadapi oleh anak-anak dan pustakawan anak muda. Meskipun demikian, mereka harus tetap waspada untuk melindungi hak kebebasan intelektual anak di bawah umur. ALA membantu dalam upaya ini dan mengakomodasi kekhawatiran orang tua dan orang dewasa lainnya dengan membuat situs web yang terhubung ke berbagai situs pendidikan dan rekreasi (ALA, 2019b)²⁶⁷. Asosiasi juga memberikan panduan penting kepada perpustakaan tentang hak-hak anak di bawah umur melalui kebijakannya, “Akses ke Sumber Daya dan Layanan Perpustakaan untuk Anak di Bawah Umur.”

5.2.9 Penjangkauan Kepada Anak-Anak Usia Dini

Perpustakaan di Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas layanan mereka dengan berfokus pada anak usia dini. Sejalan dengan meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja dan berkembangnya program penitipan anak serta prasekolah, perpustakaan dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan layanan yang mendukung perkembangan anak usia dini. Hal ini sejalan dengan konsep literasi emergent, yang menekankan pentingnya pengalaman membaca dan literasi sejak lahir (Whitehurst & Lonigan, 1998)²⁶⁸. Dengan memanfaatkan peluang ini, perpustakaan umum dapat berinovasi dan mengembangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

5. 2. 9. 1 Konsep Literasi Emergent

²⁶⁶ Jaeger, P. T., Gorham, U., Taylor, N. G., & Bertot, J. C. (2015). Teaching information policy in the digital age: Issues, strategies, and innovation. *Journal of Education for Library and Information Science*, 56(3), 175-189.

²⁶⁷ American Library Association (ALA). (2019b). *Access to library resources and services for minors: An interpretation of the Library Bill of Rights*

²⁶⁸ Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. *Child development*, 69(3), 848-872.

Konsep literasi emergent merujuk pada perkembangan bertahap keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang mendasari kemampuan membaca dan menulis pada anak usia dini (Whitehurst & Lonigan, 1998)²⁶⁹. Literasi bukanlah kemampuan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya, terutama melalui pengalaman membaca dan menulis bersama orang dewasa.

Literasi emergent mencakup berbagai aspek, antara lain: kesadaran fonologis (kemampuan mengenali dan memanipulasi bunyi dalam bahasa), pengetahuan tentang huruf, kosakata, pemahaman naratif, serta minat dan motivasi membaca. Pustakawan memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan literasi emergent ini. Mereka dapat menyediakan koleksi buku dan materi bacaan yang sesuai, menyelenggarakan program literasi seperti jam cerita dan kegiatan membaca bersama, serta memberikan saran dan bimbingan kepada orang tua dan pengasuh.

5. 2. 9. 2 Pentingnya Literasi Dini Dan Inovasi Perpustakaan

Penelitian Diamant-Cohen dan Goldsmith (2016) mengungkapkan bahwa kebiasaan membaca anak dipengaruhi oleh interaksi awal mereka dengan orang lain dan lingkungan, serta pengalaman awal dengan bahasa dan buku. Interaksi verbal dan nonverbal, serta paparan terhadap buku sejak dini, membangun fondasi yang kuat untuk keterampilan literasi di masa depan. Bahkan, kegiatan keaksaraan informal seperti waktu mendongeng memiliki dampak positif pada perkembangan otak anak.²⁷⁰

Project VIEWS2 yang dikembangkan oleh Campana et al. (2016) memberikan panduan bagi pustakawan dalam merancang dan mengevaluasi "waktu cerita yang sangat cepat" untuk anak usia dini. Dengan fokus pada intensionalitas, interaktivitas, komunitas, dan penilaian, program ini berhasil meningkatkan perilaku literasi dini baik pada penyedia maupun anak-anak (Mills et al. , 2018). Perpustakaan umum dapat mengadopsi dan mengembangkan model-model inovatif seperti ini untuk meningkatkan efektivitas program literasi dini mereka.

5. 2. 9. 3 Layanan Dan Program Inovatif Untuk Anak Usia Dini

Perpustakaan dapat mengembangkan beragam program dan layanan inovatif untuk anak usia dini, antara lain:

- a. Program lapsit interaktif: Selain membaca buku, program ini dapat melibatkan kegiatan bermain, menyanyi, dan berkreasi bersama untuk meningkatkan keterlibatan anak (Zuckerman, 2016).
- b. Platform literasi digital: Perpustakaan dapat mengembangkan aplikasi atau situs web interaktif yang menyediakan akses ke buku digital, permainan

²⁶⁹ Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). *Ibid*

²⁷⁰ Diamant-Cohen, B., & Goldsmith, A. Y. (2016). Research Roundup: The Evolution of Preschool Storytime Research. *Children and Libraries*, 14(3), 37-39.

- edukatif, dan video pembelajaran yang sesuai dengan usia anak (Klopfer, Osterweil, & Salen, 2009).
- c. Kit eksplorasi tematik: Menyediakan kit yang berisi buku, mainan, dan materi terkait tema tertentu (misalnya, alam, sains, seni) dapat merangsang rasa ingin tahu dan kreativitas anak (Hirsh-Pasek & Golinkoff, 2016).
 - d. Kemitraan dengan komunitas: Bekerja sama dengan sekolah, pusat penitipan anak, atau komunitas lokal lainnya dapat memperluas jangkauan program literasi dan meningkatkan dampaknya (Hirsh-Pasek et al. , 2015).

5. 2. 9. 4 Dukungan Untuk Orang Tua Dan Pengasuh

Selain menyediakan program dan layanan langsung untuk anak-anak, perpustakaan juga perlu memberikan dukungan kepada orang tua dan pengasuh. Pelatihan, lokakarya, atau materi informasi yang relevan dapat membantu mereka memahami pentingnya literasi dini dan cara-cara efektif untuk mendukung perkembangan literasi anak di rumah. Program penjangkauan keaksaraan awal sangat penting bagi keluarga berisiko atau keluarga yang cenderung tidak datang ke perpustakaan umum. Perpustakaan dapat berinovasi dengan menyediakan layanan konsultasi online atau kelompok diskusi virtual untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi dengan orang tua.

5. 2. 9. 5 Program "Setiap Anak Siap Membaca @ Perpustakaan Anda"

Program "Setiap Anak Siap Membaca @ perpustakaan Anda" yang dibuat oleh ALA dan Asosiasi Perpustakaan Umum (PLA) pada tahun 2004 merupakan contoh nyata upaya perpustakaan dalam mengimplementasikan program literasi dini yang efektif. Program ini berfokus pada pengasuh dan memberikan panduan praktis dalam *Every Child Ready to Read Manual* (ECRTR, 2019)²⁷¹. Perpustakaan umum dapat memanfaatkan program ini sebagai landasan untuk mengembangkan program literasi dini yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

5.2.10 Perpustakaan Umum Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar pada perpustakaan dan industri informasi. Pada tahun 1980-an, F. W. Lancaster, seorang ilmuwan perpustakaan, meramalkan munculnya "masyarakat tanpa kertas"(1985, p. 554)²⁷²Prediksi Lancaster tentang penggunaan terminal untuk mengakses informasi, menulis laporan, dan berkomunikasi melalui email telah menjadi kenyataan di era digital saat ini

²⁷¹ ECRTR (Every Child Ready to Read). 2019. "FAQs." <http://www.everychildreadytoread.org/about>

²⁷² Lancaster, F. W. (1985). The Paperless Society Revisited. *American Libraries*, 16(8), 553-55.

Yamazaki (2006) menegaskan bahwa perubahan sosial dan teknologi telah membawa dampak besar pada perpustakaan dan lembaga informasi, meliputi kemajuan pesat teknologi informasi, peningkatan volume dan jenis informasi, perubahan dalam penggunaan informasi, dan peningkatan nilai informasi(2006, p. 2)²⁷³

Selama beberapa dekade, berbagai organisasi telah menyediakan akses digital ke koleksi mereka. Pada tahun 2010, para cendekiawan dan pemimpin perpustakaan memulai diskusi untuk menciptakan jaringan terbuka sumber daya online yang komprehensif. Upaya ini melahirkan Digital Public Library of America (DPLA), yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi internet dalam memberikan akses yang adil terhadap pengetahuan. DPLA bukan pengganti perpustakaan umum, tetapi agregator item digital dari berbagai mitra.

Di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) telah mengembangkan platform digital yang menyediakan akses ke berbagai koleksi digital. Beberapa Perpustakaan Perguruan Tinggi dan khusus juga telah mengembangkan perpustakaan digital mereka sendiri.

DPLA dan perpustakaan digital di Indonesia menghadapi tantangan seperti hak digital, pelatihan profesional, dan pendanaan. Namun, minat terhadap bahan warisan budaya digital terus meningkat, dan perpustakaan digital memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memberdayakan masyarakat melalui literasi digital

Upaya awal ini menyebabkan terciptanya Digital Public Library of America (DPLA). DPLA tidak dirancang untuk menggantikan perpustakaan umum tetapi untuk memberikan peluang unik untuk memanfaatkan potensi internet. Misi DPLA adalah “memberikan akses yang adil terhadap pengetahuan untuk semua” (DPLA 2019a, 1).²⁷⁴ Perpustakaan Umum Digital Amerika juga memberdayakan orang untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi pada masyarakat yang beragam dan berfungsi lebih baik dengan memaksimalkan akses ke sejarah, budaya, dan pengetahuan kita bersama (DPLA, 2019b, 1).

Untuk lebih spesifik, DPLA kurang merupakan gudang item digital daripada agregator item digital. Mitra yang berpartisipasi, yang dikenal sebagai hub digital, mendigitalkan item mereka dengan cara standar yang membuatnya dapat diakses melalui DPLA. DPLA pada gilirannya menggabungkan metadata yang ditetapkan untuk item ini sehingga dapat dicari dan ditemukan oleh pengguna di mana saja (Cottrell 2013)²⁷⁵

²⁷³ Yamazaki, H. (2007). Changing society, role of information professionals and strategy for libraries. *IFLA journal*, 33(1), 50-58.

²⁷⁴ DPLA (Digital Public Library of America). 2019a. “Collaborating for Equitable Access to Knowledge for All: A Renewed Strategy for DPLA.”

²⁷⁵ Cottrell, M. (2013). A digital library for everybody. *American Libraries*, 44(3/4), 44-47.

Saat DPLA dimulai pada 18 April 2013, tersedia 2,4 juta item; pada 2019, hampir 35 juta item dapat diakses, dan pertumbuhan tahunan yang berkelanjutan diantisipasi. Daftar mitra sangat mengesankan. Hub yang menyediakan konten digital termasuk J. Paul Getty Trust, Perpustakaan Harvard, HathiTrust, Arsip Internet, Perpustakaan Kongres, Administrasi Arsip dan Arsip Nasional, Perpustakaan Umum New York, Lembaga Smithsonian, dan Kantor Penerbitan Pemerintah AS (DPLA 2019c, 1).²⁷⁶

Di antara tantangan yang dihadapi DPLA adalah hak digital dan masalah hak cipta internasional; memberikan pelatihan yang diperlukan kepada para profesional ilmu perpustakaan dan informasi untuk membuat koneksi yang dibutuhkan; dan pendanaan berkelanjutan (Cohen 2014). Terlepas dari tantangan ini, ada pertumbuhan yang luar biasa dalam minat tentang bahan warisan budaya. Orang ingin melihat dokumen, foto, gambar bergerak, buku, dan materi lain yang merupakan bagian dari arsip, museum, dan perpustakaan kami. DPLA adalah langkah penting dalam membuat barang-barang tersebut benar-benar

Pada sebuah konferensi perpustakaan di Finlandia pada tahun 1980-an, seorang ilmuwan bidang perpustakaan Amerika, Lancaster telah memprediksi akan kemunculan "paperless society" sebagai akibat kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Beberapa tahun sebelum internet booming, pada tahun 1985, Lancaster juga memprediksi bahwa "ilmuwan akan menggunakan terminal untuk memaintain notebook elektronik, menulis laporan untuk publikasi elektronik berikutnya, mengakses sumber informasi dalam bentuk database, mengindeks dan menyimpan informasi, dan mengkomunikasikannya dengan menyebarkannya dalam sebuah jaringan. Laporan ilmiah akan ditampilkan di database dan komunikasi antar penulis, editor akan dilakukan menggunakan email" (Lancaster, 1985, p. 554)²⁷⁷. Prediksi Lancaster saat ini telah terjadi, era digital membawa perubahan besar pada perpustakaan dan industri informasi, dan pendapat tersebut diperkuat oleh Yamazaki (2006, p. 2)²⁷⁸ yang menyatakan terjadinya perubahan besar dan serius pada perpustakaan dan lembaga informasi karena adanya perubahan sosial dan teknologi yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

- 1) Teknologi Informasi telah membuat kemajuan besar akses Internet yang digunakan di seluruh dunia.
- 2) Volume dan jenis informasi yang diproduksi telah mencapai ke tingkat yang mengkhawatirkan terutama pada sistem Web.
- 3) Terjadinya perubahan yang sangat mencolok dalam penggunaan informasi dan sistem informasi, dimana pengguna akhir informasi dimampukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui internet tanpa harus

²⁷⁶DPLA (Digital Public Library of America). 2019c. "Our Hubs." <https://pro.dp.la/hubs/our-hubs>.

²⁷⁷ Lancaster, F. W. (1985). The Paperless Society Revisited. *American Libraries*, 16(8), 553-55.

²⁷⁸ Yamazaki, H. (2007). Op.cit.

mengunjungi perpustakaan atau tanpa melakukan konsultasi apapun dengan pustakawan.

- 4) Nilai dari informasi itu sendiri dapat ditingkatkan dalam skema bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Selama beberapa dekade, berbagai organisasi telah menyediakan akses ke koleksi digital buku dan gambar mereka yang besar serta materi sejarah, audiovisual, dan jenis materi lainnya (DPLA 2019a)²⁷⁹. Pada tahun 2010, para cendekiawan, pemimpin perpustakaan, perwakilan yayasan, dan lainnya memulai diskusi serius untuk menciptakan “jaringan terbuka dan terdistribusi dari sumber daya online yang komprehensif yang akan memanfaatkan warisan hidup bangsa dari perpustakaan, universitas, arsip, dan museum untuk mendidik, menginformasikan dan memberdayakan semua orang di generasi sekarang dan yang akan datang” (DPLA 2019a, hal. 1).

Pada tahun 1980-an, F. W. Lancaster, seorang ilmuwan perpustakaan, telah meramalkan munculnya "masyarakat tanpa kertas" sebagai akibat dari kehadiran teknologi informasi dan komunikasi. Prediksi Lancaster tentang penggunaan terminal untuk mengakses sumber informasi, menulis laporan, dan berkomunikasi melalui email telah menjadi kenyataan di era digital saat ini.

Di Indonesia, perkembangan perpustakaan digital juga terjadi seiring dengan kemajuan teknologi. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) telah mengembangkan platform digital yang menyediakan akses ke berbagai koleksi digital, termasuk buku, majalah, jurnal, dan naskah kuno. Pengguna dapat mencari, membaca, dan mengunduh materi yang tersedia melalui situs web Perpusnas.

Selain Perpusnas, beberapa Perpustakaan Perguruan Tinggi dan khusus di Indonesia juga telah mengembangkan perpustakaan digital mereka sendiri. Namun, aksesibilitas dan kualitas layanan perpustakaan digital di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai potensi penuhnya dalam melayani masyarakat.

DPLA menghadapi tantangan seperti hak digital, masalah hak cipta internasional, pelatihan profesional, dan pendanaan berkelanjutan (Cohen, 2014). Namun, minat terhadap bahan warisan budaya digital terus meningkat. DPLA menjadi langkah penting dalam menyediakan akses terbuka terhadap materi-materi tersebut.

Perpustakaan digital di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, termasuk infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan manfaat perpustakaan digital.

Namun, peluang yang ditawarkan oleh perpustakaan digital sangat besar. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perpustakaan dapat memperluas jangkauan layanan mereka, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memberdayakan masyarakat melalui literasi digital.

²⁷⁹ DPLA (Digital Public Library of America). 2019a. “Collaborating for Equitable Access to Knowledge for All: A Renewed Strategy for DPLA.”

Perpustakaan digital telah merevolusi cara masyarakat mengakses dan memanfaatkan informasi. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, perpustakaan digital dapat terus berkembang dan berperan penting dalam meningkatkan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat di era digital.

5.3 Tantangan Masa Depan Perpustakaan Umum Di Era Digital

Di tengah gempuran teknologi digital, perpustakaan umum di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pemikiran strategis dan tindakan proaktif. Menjaga relevansi, membangun kepercayaan, mengatasi keterbatasan anggaran, serta merespons keragaman masyarakat menjadi krusial. Selain itu, perpustakaan dituntut untuk berperan aktif dalam mengadvokasi regulasi ruang digital yang mendukung akses informasi yang setara, mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian global, membangun kemitraan strategis, mengatasi ketimpangan geografis, dan meningkatkan status pustakawan. Tantangan lainnya adalah memenuhi harapan akan akses informasi global, menjembatani kesenjangan digital, dan mengembangkan pemikiran strategis untuk masa depan. Mari kita bahas lebih dalam tantangan-tantangan ini:

1. **Menjaga Relevansi di Era Digital:** Perpustakaan harus bertransformasi menjadi pusat belajar sepanjang hayat yang memberdayakan masyarakat dengan menyediakan akses informasi terpercaya, literasi digital, dan ruang komunitas yang inklusif. Ini sejalan dengan tujuan TPBIS untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Pasal 3).
2. **Membangun Kepercayaan di Tengah Menurunnya Kepercayaan pada Nilai Komunitas dan Informasi:** Perpustakaan perlu memperkuat peran mereka sebagai pusat komunitas yang inklusif dan sumber informasi terpercaya dengan menyediakan informasi akurat, memfasilitasi dialog terbuka, dan berkolaborasi dengan komunitas. Hal ini sesuai dengan IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022 dan TPBIS (Pasal 3).
3. **Mengatasi Ketatnya Anggaran Publik dan Investasi Terbatas:** Perpustakaan harus mencari solusi cerdas dalam mengatasi keterbatasan anggaran, seperti memanfaatkan teknologi, menjalin kemitraan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini sejalan dengan TPBIS (Pasal 29) dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024.
4. **Menyediakan Layanan yang Inklusif dan Responsif terhadap Meningkatnya Keragaman Masyarakat:** Perpustakaan harus memastikan layanan mereka inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat,

termasuk kelompok rentan dan minoritas. Hal ini sesuai dengan amanat TPBIS (Pasal 3) dan IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022.

5. Mengadvokasi Regulasi Ruang Digital yang Mendukung Akses Informasi yang Setara: Perpustakaan perlu berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung akses informasi yang setara dan kebebasan intelektual di ruang digital. Hal ini penting mengingat regulasi ruang digital yang cepat dan seringkali tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap peran perpustakaan dalam mendukung pembangunan (Laporan Tren IFLA 2023). TPBIS juga mendorong perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam menghadapi regulasi ruang digital (Pasal 3).
6. Mempersiapkan Diri Menghadapi Meningkatnya Ketidakpastian Global: Perpustakaan perlu mengembangkan rencana kesiapsiagaan bencana dan memperkuat infrastruktur untuk menghadapi perubahan iklim, konflik, dan bencana alam. TPBIS menekankan pentingnya transformasi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna dalam menghadapi situasi krisis (Pasal 3 dan 8).
7. Mengatasi Hambatan dalam Membangun Kemitraan: Perpustakaan perlu membangun kemitraan yang strategis dan berkelanjutan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. TPBIS secara khusus mendorong pembangunan komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk keberlanjutan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (Pasal 6).
8. Menghilangkan Ketimpangan Geografis dan Investasi yang Tidak Merata: Perpustakaan perlu memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani melalui berbagai strategi, seperti perpustakaan keliling, layanan digital, dan kemitraan dengan perpustakaan desa. Hal ini sesuai dengan TPBIS (Pasal 3) dan Laporan Tren IFLA 2023.
9. Mengangkat Status Pustakawan sebagai Aktor Utama dalam Pembangunan: TPBIS mengakui pentingnya peran pustakawan dalam transformasi perpustakaan. Dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, perpustakaan dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka sebagai aktor utama dalam pembangunan (Pasal 7). Selain itu, perpustakaan perlu memberikan kesempatan pengembangan diri bagi pustakawan dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini sesuai dengan poin "Library and information workers are seen as auxiliaries, rather than development actors in their own right" dalam Laporan Tren IFLA 2023 (hlm. 25), yang menyoroti pentingnya mengakui pustakawan sebagai aktor kunci

dalam pembangunan. Peran pustakawan juga akan berkembang menjadi fasilitator pemahaman informasi, kurator yang membangkitkan rasa ingin tahu, serta pemecah masalah bagi masyarakat. Pustakawan harus memiliki kompetensi budaya, kemampuan belajar cepat tentang teknologi baru, dan kemauan untuk membantu masyarakat memecahkan masalah (Lehman, 20184. hlm. 11).²⁸⁰

10. Memenuhi Harapan Baru untuk Akses Informasi Global: Perpustakaan perlu membangun jaringan dan kerjasama dengan perpustakaan lain di tingkat nasional dan internasional untuk menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi global, termasuk sumber daya digital. Hal ini sejalan dengan TPBIS (Pasal 3).
11. Menjembatani Kesenjangan Digital yang Persisten: Perpustakaan harus menyediakan akses internet gratis, sumber daya pembelajaran online, dan pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat yang kurang terlayani. TPBIS menekankan pentingnya meningkatkan literasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan dan mengatasi kesenjangan digital (Pasal 3).
12. Mengembangkan Pemikiran Strategis untuk Mengatasi Krisis dan Merancang Masa Depan: Perpustakaan perlu melakukan "future proofing" dengan mengidentifikasi tren masa depan, mengembangkan skenario masa depan, merancang strategi adaptif, dan berinvestasi dalam sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini sejalan dengan TPBIS (Pasal 4, 17, dan 18) dan Laporan Tren IFLA 2023.

²⁸⁰ Lehman, M. L. (2018). Future-Proofing the Public Library. *Public Library Quarterly*, 37, 408-419.

4. Peran Aktif dalam Open Science: PDDI LIPI dapat berperan aktif dalam gerakan *open science* dengan menyediakan akses terbuka terhadap data penelitian dan mempromosikan praktik penelitian terbuka.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi: PDDI LIPI dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam konteks pandemi, PDDI LIPI telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk tetap memberikan layanan kepada pengguna melalui berbagai platform daring (Rizzal Rosiyan & Maha, 2020).

Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, PDDI LIPI memiliki landasan yang kuat untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanannya agar tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna di era digital. Tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dapat diatasi dengan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun lembaga penelitian lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas akses terhadap sumber daya, tetapi juga memperkaya perspektif dan keahlian yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan yang lebih inovatif dan relevan.

PDDI LIPI juga perlu terus mengembangkan kompetensi pustakawan dan stafnya agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tren terkini dalam pengelolaan informasi ilmiah. Pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan akan memastikan bahwa PDDI LIPI memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Selain itu, PDDI LIPI dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanannya. Pengembangan platform digital yang terintegrasi, seperti sistem pencarian yang canggih, repositori data penelitian yang mudah diakses, dan layanan referensi online yang responsif, akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi ilmiah.

Dengan terus berinovasi dan meningkatkan layanannya, PDDI LIPI dapat memperkuat posisinya sebagai pusat informasi ilmiah terkemuka di Indonesia, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih berpengetahuan dan inovatif.

BIODATA PENULIS



Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum. adalah seorang dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ilmu perpustakaan, teknologi pendidikan, dan pendidikan agama Islam, dengan gelar S3 dari Universitas Negeri Jakarta, S2 dari Universitas Indonesia, dan S1 ganda dari IAIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Indonesia.

Penulis aktif terlibat dalam organisasi profesi perpustakaan, termasuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Penulis pernah menjabat sebagai Ketua IPI Provinsi Banten dan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi Banten. Karya ilmiahnya mencakup berbagai topik terkait perpustakaan dan teknologi pendidikan, dengan publikasi di jurnal internasional dan nasional.

Selain mengajar, Jamridafrizal aktif sebagai narasumber dan moderator dalam berbagai seminar dan lokakarya tingkat nasional dan provinsi. Penulis juga menjadi juri dalam pemilihan pustakawan berprestasi dan lomba perpustakaan sekolah. Kontribusinya dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi Islam sangat signifikan, terutama di Provinsi Banten.



Zulfitri, S.Ag., MA adalah seorang pustakawan ahli madya di UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ilmu perpustakaan dan tafsir hadis, dengan gelar S2 dari IAIN Imam Bonjol Padang dan sedang menempuh pendidikan S3 di UIN Imam Bonjol Padang.

Zulfitri aktif terlibat dalam organisasi profesi pustakawan, termasuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), FPPTI Sumatera Barat, dan APPTIS. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan saat ini menjabat sebagai Koordinator Layanan Referensi. Zulfitri juga aktif sebagai tim penilai dalam lomba pustakawan dan perpustakaan tingkat Sumatera Barat.

Selain bekerja sebagai pustakawan, Zulfitri juga memiliki pengalaman sebagai pengajar dan dosen luar biasa di IAIN Imam Bonjol Padang. Kontribusinya dalam bidang perpustakaan dan keilmuan Islam sangat signifikan, terutama di Sumatera Barat



Muhammad Farid Wajdi, S.Si, S.IPI, M.Hum adalah dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia. Pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Yarsi Jakarta dan Fisika Universitas Indonesia.

Penulis aktif terlibat dalam organisasi profesi perpustakaan. Penulis pernah menjadi pengurus Ikatan Pustakawan Provinsi Banten dan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi Banten, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Provinsi Banten serta aktif sebagai pengurus Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS).